Economica

Mimbar Ekonomi, Sosial, dan Budaya

#Edisi

64

2022

Gig Economy

Gig Economy:

Hadiah atau Musibah bagi Ketenagakerjaan Indonesia?

ISSN 0216-1154

Economica id
Baca dari mana saja dan kapan saja.
MILD REPORT
IN-DEPTH
Akses sekarang
economica.id

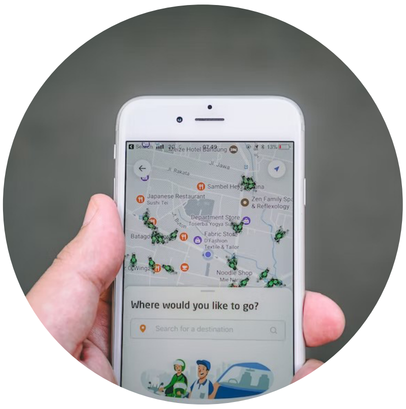

8 TULISAN UTAMA 1
Gig Economy: Pekerjaan Masa Depan Manusia

12 TULISAN UTAMA II
Manis Pahitnya *Gig Economy* di Indonesia

15 TULISAN UTAMA III
Gig Economy: Regulasi, Ekspektasi, dan Evaluasi

26 SOSIAL
Menyibak Ilustrasi Kesetaraan dalam Meritokrasi

28 TOKOH
Perjalanan Aurora Marsye: Mendorong Aksesibilitas Pekerja *Blue Collar* dan Peran Perempuan di Dunia Kerja

30 SENI BUDAYA
Pencak Silat: Seni Bela Diri yang Mendunia

Secangkir Teh - 6
Gig Economy Menyelamatkan Indonesia, Pekerja Gig Diselamatkan Siapa?

Tulisan Utama I - 8
Gig Economy: Pekerjaan Masa Depan Manusia

Tulisan Utama II - 12
Manis Pahitnya Gig Economy di Indonesia

Tulisan Utama III - 15
Gig Economy: Regulasi, Ekspektasi, dan Evaluasi

Infografis - 18

Kajian - 20
Menghitung Derma yang Sia-sia

Penelitian - 22
The Business Cycle, Health Behavior, and Chronic Disease: A Study over Three Decades

Piksel - 24

Sosial - 26
Menyibak Ilustrasi Kesetaraan dalam Meritrokasi

Tokoh - 28
Perjalanan Aurora Marsye: Mendorong Aksesibilitas Pekerja Blue Collar dan Peran Perempuan di Dunia Kerja

Seni Budaya - 30
Pencak Silat: Seni Bela Diri yang Mendunia

Kolom - 32
KANOPI FEB UI
IBEC FEB UI
SPA FEB UI
MSS FEB UI

Realita - 40
Stagflasi Global dan Implikasi terhadap Perekonomian Indonesia

Peluang - 42
Golekin: Kerupuk Kulit Milenial

Pojok - 44
Pergi

Ketenagakerjaan - 46
BPJS Ketenagakerjaan: Pilar Proteksi Gig Workers di Indonesia

Revolusi Industri 4.0 yang memadukan antara otomatisasi dan teknologi siber telah mengubah kebiasaan dan tatanan hidup manusia. Tak terkecuali, tentang cara mereka bekerja dan menjalani bisnis. Munculnya berbagai aplikasi yang menyediakan jasa transportasi, memesan makanan, hingga tiket pesawat memberikan kemudahan bagi banyak orang sehingga dengan cepat, teknologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Arus perkembangan teknologi ini juga turut membawa tren baru dalam perekonomian, yaitu melalui *gig economy.*

Konsep *gig economy* ini telah menaikkan popularitas pencarian pekerja lepas bagi perusahaan. Pesatnya pertumbuhan *gig economy* terjadi tak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Menanggapi fenomena yang tengah naik daun ini, berbagai macam pandangan ikut muncul menyertainya.

Di tengah kepopulerannya, Majalah Economica pun hadir pada edisinya yang ke-64 untuk mengajak pembaca larut dalam pembahasan mengenai *gig economy*. Pembaca akan diajak untuk menggali makna dari *gig economy*, pertumbuhan dan potensinya, serta kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pekerja *gig economy* di Indonesia.

Tak berhenti di situ, Majalah Economica edisi ke-64 juga membawa perspektif menarik tentang topik lainnya, seperti sosial, seni budaya, hingga tokoh. Majalah Economica juga tak lupa menyisipkan rekreasi bagi pembaca lewat karya sastra yang telah diberikan.

Lebih lanjut, Majalah Economica juga memberikan wadah bagi sederet entitas di FEB UI—mulai dari organisasi, himpunan, hingga alumni—untuk ikut meramaikan Majalah Economica lewat gagasan-gagasannya yang disesuaikan dengan bidang masing-masing.

Menutup rangkaian kata, Tim Redaksi berharap agar Majalah Economica dapat menyibak tirai pengetahuan dan memberikan pandangan yang segar terkait isu yang dibahas. Semoga Majalah Economica dapat menjadi bacaan yang menghibur, informatif, dan bermanfaat bagi Anda, para pembaca setia.

Selamat membaca!
Tim Redaksi

BADAN OTONOM **Economica**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

PELINDUNG Tuhan Yang Maha Esa
PENERBIT Badan Otonom Economica
PENANGGUNG JAWAB Pengurus Inti BOE FEB UI
PEMIMPIN ORGANISASI Maria Regina Yofanka

PEMIMPIN UMUM Gabriel Fiorentino Setiadin
PEMIMPIN REDAKSI Madina Fiscarine
REDAKTUR PELAKSANA Haizka Aleine Kalya
WAKIL REDAKTUR PELAKSANA Christabel Nathania Surya
CO-EDITOR 1 Reza Pramudito
CO-EDITOR 2 Vania Putri Anasya
REDAKSI Aurelia Julia Irvana, Alifia Yumna Mumtazah, Nurul Sekararum, Raka Yuda Priyangga, Trinita Riana, Kleovan Nathanael Gunawan, Phylicia Febian, Tara Saraswati, Jeni Rima Puspita, Abdul Karim, Ivan Bintang Pamungkas, Fajarani Dwi N. Safitri, Shafira Taqiyya, Karen Theona Paramitha, Adisty Eka Zhafirah, Rania Fairuz Davianti, Daffa Dzakwan, Felicia Kinanti, Sofia Chandra, Avrilia Angelie Wijaya
ILUSTRASI SAMPUL Zhafirah Hafizh
DESAIN DAN TATA LETAK Economica
RISET DAN KAJIAN Divisi Penelitian BO Economica, Divisi Kajian BO Economica
LAUNCHING Eunizoe Lael Octauno (Redaktur), Muhammad Rafi Fadhillah (Wakil 1), Eva Julida Parningotan Situmorang (Wakil 2), Trinitia Riana Sitorus, Karen Theona Paramitha, Wildan Bagus Maulana, Sean Akmal Osmardifa, Dalila Rahma Gammaerdanta, Nadira Meuthia Jefri, Adisty Eka Zhafirah, Avrilia Angelie Wijaya, Deasma Hazel, Anindya Vania, Syifa Carla Belinda, Muhammad Rafly Fadhly Putra, Fajarani Dwi Nur Safitri, Nurul Sekararum, Farhan Aditya Ramadhan, Kayla Andan Sari, Jeni Rima Puspita, Ivan Bintang Pamungkas, Alifia Yumna Mumtazah, Qisthan Ghazi, Rayhan Xavier, Flora Belva Wijaya

BADAN OTONOM **Economica**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

PENGURUS INTI
Maria Regina Yofanka (Ketua Umum), Qurratu Aina (Sekretaris Umum), Dik Ajeng Sekar Putri Taufanti (Bendahara Umum), Akmal Haikal Rahardian (Kontrolir)

INTERNAL AUDIT
Kinasha Nadindya, Abelardo Sebastian Tambunan, Felix Wijaya

DIVISI PENERBITAN
Gabriel Fiorentino Setiadin (Ketua), Tahtia Anharani Sazwara (Wakil), Madina Fiscarine (Wakil), Nismara Paramayoga, Haizka Aleine Kalya, Christabel Nathania Surya, M. Zaky Nur Fajar, Alfina Nur Afriani, M. Ramadhani, Qisthan Ghazi, Anindya Vania, Vania P. Anasya, Tara Saraswati, Jeni Rima Puspita, Alifia Yumna Mumtazah, Reza Pramudito

DIVISI PENELITIAN
Aisha Rizqi M. (Ketua), Bilal Reginald (Wakil), Fadhel Haryo B. (Wakil), Hegar Pangestu Egieara (Wakil), Tarisha Yuliana, Risa Indrawati, Yehezkiel Raka P., Erin Glory P., Phylicia Febian, Siwi Rosari., Adis Susita Rahma, Debra Rafaela, Daffa Dzakwan J., Rayhan Xavier, Kleovan Nathanael G., Nurul Sekararum, Annisa Zata Ismah

DIVISI KAJIAN
Ricardo Juan (Ketua), Yudhistira Gowo Samiaji (Wakil), Komang Bintang Sanjiwani M., Raka Yuda P., Asido Septian M. Nababan, Aurelia Julia Irvana, Karen Theona P., Stefani Shinta Wita, Trinita Riana, Farhan Aditya Ramadhan, M. Rafly Fadhly Putra

DIVISI PROYEK
Nurul Azmi Lestari (Ketua), Marcello Patrick (Wakil), Rifqi Dwi Fianto (Wakil), Eunizoe Lael Octauno, Shafira Taqiyya, M. Amri Mustafa, Salma Nur Isnaini, Eva Julida, Evelyne Seravina Loing, Azzahra Salma Maulana, Felicia Kinanti, Ummi Nurun Nissa

BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Timothy Joel (Ketua), Regi Trevina (Wakil), Vezia Berliana Hasian (Wakil), Revanza Auditya, Rini Nurhafizah, Abdul Karim, Sofia Chandra, Laksmana Anggitapradhana, Avrilia Angelie Wijaya, Fajarani Dwi N. Safitri, Flora Belva Wijaya, Ivan Bintang Pamungkas

BIRO HUBUNGAN LUAR
Yumnaa Bustainah Mudzofar (Ketua), Muhammad Zadda Ilman (Wakil), I Made Kharisma Agung Putra (Wakil), Rania Fairuz Davianti, M. Rafi Fadhillah, Harya Vandika Daniswara, Mona Agatha Priscilia, Kamisjka Ghifara, Dalila Rahma G., Daffa M. Zidan, Sean Akmal Osmardifa

BIRO DESAIN DAN TEKNOLOGI
Batrisyia Izzati Ardhie (Ketua), Fadhli Rahman Jamal (Wakil), Evita Juliana, Saffana Putri Andriana, Ahmad Adiyaat, Elizabeth, Alvita Stephanie, Viona Avinda Zahran, Jamie Paulus, Syifa Carla Belinda, Nadira Meuthia Jefri, Adisty Eka Zhafirah, Kayla Andan Sari, Wildan Bagus Maulana, Deasma Hazel

KONTAK
Website : economica.id
Telepon : (021) 7865084
E-mail : boeconomica@live.com

ALAMAT KANTOR
Gedung Student Center FEB UI Lt.1
Kampus Baru UI, Depok
Jawa Barat 16424
Indonesia

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

"Gig economy itu membantu untuk mengatasi kemiskinan, bertahan di masa pandemi, tapi apakah pekerjaan kita selesai sampai di situ? Tidak kan. Kita tidak mau gig economy membawa bayangan gelap yaitu kondisi pekerja yang tereksploitasi."

Stella Kusumawardhani
Economic Reserach Lead
Tenggara Strategics

GIG ECONOMY
DI MATA MEREKA

"Saya rasa sistem gig economy ini bagus untuk Indonesia, tetapi kita harus paham bahwa kita bersaing dengan negara lain, seperti Korea, Vietnam, India yang sudah lebih mampu menghadapi pekerja gig di negaranya."

Semuel Abrijani Pangarepan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

FOTO: LATRACH MED JAMIL | UNSPLASH.COM

GIG ECONOMY MENYELAMATKAN INDONESIA, PEKERJA *GIG* DISELAMATKAN SIAPA?

FOTO: A.P. ASTAMUDOKUMENTASI PRIBADI

Maria Regina Yofanka (Ketua Umum B.O. Economica)

Air susu dibalas air tuba, analogi yang sesuai dengan tindakan Indonesia kepada para pekerja gig yang terus menerus dieksploitasi tanpa perlindungan. Beribu-ribu kasus telah berlalu dan negeri ini masih pura-pura tidak tahu.

Gig Economy: Pilihan Sekaligus Tuntutan

Dalam perjalanan hidupnya, mayoritas masyarakat Indonesia merasakan dampak bertubi-tubi dari fenomena ekonomi yang terjadi di negeri ini, mulai dari inflasi, resesi akibat pandemi Covid-19, serta kelangkaan bahan pokok yang mengancam finansial dan kualitas hidupnya. Sebagian besar orang-orang yang telah menggantungkan hidupnya kepada skema ekonomi konvensional, serta berserah kepada nurani dan rasionalitas perusahaan tempatnya bekerja tetap kehilangan pekerjaan dan kekurangan uang.

Sejak 2015 hingga 2022, perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 akibat terjadinya pandemi (BPS, 2022). Tren positif ini diikuti produktivitas ekonomi dan lapangan kerja yang juga meningkat. Meskipun demikian, proses pencarian kerja di lapangan konvensional masih kerap diikuti dengan persyaratan pendidikan formal dan tinggi. Hal ini meninggalkan 87,36% masyarakat Indonesia yang tidak melewati pendidikan tinggi mengalami lebih banyak rintangan dan pilihan yang terbatas dalam mendapatkan pekerjaan konvensional (BPS, 2022). Setelah mendapatkan pekerjaan, masyarakat juga tidak lepas dari masalah finansial yang terjadi karena kenaikan gaji di perusahaan di Indonesia kerap tidak selaras dengan inflasi, menyebabkan kemampuan beli masyarakat semakin menurun. Hal ini kembali memuncak pada saat pandemi, di mana marak terjadi pemotongan gaji oleh perusahaan-perusahaan di saat harga semakin meningkat. Masyarakat digentayangi kekhawatiranakan biaya-biaya tidak terduga. Faktor-faktor ini yang membuat gaji saja kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga salah satu jalan yang bisa diambil adalah bekerja sambilan untuk menambah pendapatan.

Gig economy menciptakan pasar tenaga kerja alternatif bagi masyarakat untuk bekerja pada posisi sementara sebagai pekerja lepas atau mitra independen. Skema ini memberikan kebebasan cara kerja, pemberian tarif, dan fleksibilitas waktu yang lebih tinggi dari pekerjaan konvensional sehingga pekerja dapat merangkul kehidupan kerja yang lebih kreatif dan efisien, serta mengambil pekerjaan jangka pendek sesuai keinginan, kebutuhan, dan kemampuannya. Tidak hanya untuk pekerja, skema ini juga telah membantu sebagian besar perusahaan dengan memanfaatkan ilmu praktisi berpengalaman dari luar serta biaya yang lebih murah dan sementara dibandingkan pekerja tetap. Tidak jarang perusahaan lebih memilih untuk mengambil tenaga *gig* berdasarkan kebutuhan proyek saja dibandingkan membuka lowongan tetap.Meskipun skema *gig economy* telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menurunkan angka pengangguran sebagaimana hasil penelitian Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) dan *Tenggara Strategics* (2019), tetapi terkadang menjadi pekerja tanpa jaminan dan perlindungan layaknya pekerja konvensional di skema *gig economy* bukan lagi sebuah alternatif bagi masyarakat, melainkan menjadi satu-satunya jalan.

Negara Lain Berkerah untuk Melindungi Pekerja *Gig*, Apa Kabar Indonesia?

Umumnya, pekerja *gig* memiliki tuntutan tersendiri untuk memasarkan jasanya dan membangun relasi dengan pelanggan. Melihat hal tersebut, banyak perusahaan hadir dan memberikan solusi bagi pekerja untuk kedua permasalahan tersebut, sehingga pekerja bisa lebih fokus dalam mengerjakan kerjanya. Sebagai imbalan, perusahaan akan mendapatkan potongan dari bayaran yang akan diterima oleh pekerja. Model bisnis berbentuk potongan bayaran tersebut telah dijalani oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bahkan dunia. Meskipun demikian, tidak jarang perusahaan tersebut memiliki kontrol penuh terhadap penetapan harga dan pembagian persentase pendapatan dari pekerja.

Di Indonesia sendiri, para kurir dan *online driver* menjadi korban utama dari keti-

dakadilan model kerjasama antara *platform* dan pekerja ini, di mana sejak pandemi 2020, pembagian pendapatan serta *incentives* yang didapatkan oleh kurir dan *online driver* di perusahaan-perusahaan ternama terus berkurang. Hal tersebut menjadi ironis mengingat pekerja *gig* telah menjadi kelompok garis depan di seluruh dunia untuk menjaga roda ekonomi tetap berjalan selama gejolak pandemi Covid-19 di tahun 2020-2022.

Tidak hanya di Indonesia, pekerja *gig* telah menyelamatkan banyak bisnis di seluruh dunia. Oleh karena itu, negara-negara di dunia mulai menyadari kondisi pekerja *gig* yang tidak teregulasi dan terjamin apapun membuat mereka semakin rentan dieksploitasi bahkan merugi dengan embel-embel fleksibilitas kerja. Pemerintah AS tengah mengusulkan undang-undang perburuhan baru untuk mengklasifikasikan jutaan pekerja lepas di Amerika sebagai karyawan. Hal ini ditujukan untuk menjamin pekerja mendapatkan upah, tunjangan, dan perlindungan yang sepadan serta melindungi para pekerja dari eksploitasi oleh perusahaan dengan menghentikan model tenaga kerja berbiaya rendah, seperti perusahaan *food delivery* dan *ride hailing*. Hal yang sama telah ditetapkan oleh pemerintah Inggris pada Juli 2022, dalam pedoman pemerintahan berdasarkan kejelasan status para pemain di *Gig Economy* sehingga pekerja dapat mengklasifikasi hak-hak mereka – mulai dari upah minimum, tunjangan, hingga cuti berbayar - sembari tetap mendapatkan fleksibilitas waktu dan jumlah pekerjaan yang diambil. Negara-negara tersebut menunjukkan kemajuan dalam perlindungan hak terhadap para pekerja *gig* di lapangan.

Hal yang sama belum bisa dikatakan terjadi Indonesia. Perusahaan platform *gig economy*masih beralih dengan isi Undang-Undang No 13 tahun 2003 di mana pekerja tidak bekerja untuk mereka, melainkan untuk pelanggan yang memberi mereka upah. Meskipun demikian, pekerja tidak dilibatkan dalam penentuan upah dan beban kerja sebagai mitra, dan platform kerap mengambil keputusan sepihak. Dengan pembagian insentif sepihak dan berjumlah kecil, pekerja tidak punya fleksibilitas untuk mengatur kapan mereka bekerja seperti yang telah dijanjikan. Setelah mempertimbangkan jam kerja pekerja dan biaya yang keluar, sebagian pekerja tidak bisa mendapatkan upah minimum. Mereka yang berpenghasilan lebih kerap terpaksa bekerja hingga seratus jam seminggu, sebagaimana yang dialami oleh dua puluh persen pekerja *gig* (Fairwork, 2021).

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memperkenalkan pedoman pembayaran tarif per kilometer untuk memenuhi standar upah minimum. Namun hasil studi oleh Fairwork (2021) menunjukkan bahwa keadilan upah, kondisi kerja, kontrak, manajemen, dan representasi di *gig economy*Indonesia masih jauh di bawah standar. Hal ini dilengkapi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang tidak mengizinkan pekerja gig untuk membentuk serikat pekerja formal dan membuat semakin tidak ada pihak yang bisa membela dan menggaungkan suara mereka.

Future Proof Scheme, Gig Economy sebagai Safety Net

Gig economy telah berkontribusi langsung setidaknya tujuh miliar dolar Amerika Serikat bagi perekonomian Indonesia dan berhasil mempekerjakan setidaknya empat juta orang (LDFEB UI, 2019). Meskipun demikian, apakah *gig economy*merupakan skema yang tepat untuk para pekerja di Indonesia? Secara teknis, *gig economy* bisa menjadi pilihan yang baik untuk menjual kemampuan yang dimiliki melihat otoritas yang ditawarkan pada para pekerja. Bagaimanapun, melihat mayoritas pekerjaan *gig economy* yang belum terfasilitasi dan teregulasi dengan baik, serta pemerintah yang tidak progresif dalam melindungi dan mengakomodasi para pekerjanya, skema ekonomi ini belum bisa dibuktikan sudah terlaksana dengan baik di Indonesia.

Meskipun demikian, *gig economy* di Indonesia tetap bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai alur pendapatan tambahan bagi masyarakat. Menurut Harvard Business Review, kesuksesan di *gig economy* terjadi saat kepastian akan keberlangsungan pekerjaan (*viability*) dan kepuasan dalam kerja (*vitality*) seimbang. Bekerja secara independen bukan berarti bekerja lebih sedikit, melainkan sebaliknya. Pekerja dituntut untuk mengatur pekerjaan dan waktunya sendiri, dan tidak sedikit masyarakat yang belum siap sepenuhnya untuk terjun ke *gig economy*. Kabar baiknya, pekerjaan konvensional dan *gig* tidak sepenuhnya eksklusif terhadap satu sama lain. Seiring perkembangan jaman, kondisi pekerjaan konvensional juga memberikan waktu luang lebih bagi pekerjanya, seperti dengan penerapan *work from anywhere*, sehingga pekerja bisa memanfaatkan waktunya untuk mengambil beberapa pekerjaan *gig* untuk alur pendapatan kedua. Selain itu, *gig economy*juga bisa memfasilitasi kebutuhan kerja bagi masyarakat yang belum bisa mendapatkan pekerjaan konvensional sebagai sumber pendapatan cadangan.

Menjadikan *gig economy* sebagai jaring pengaman merupakan strategi yang bisa dikerahkan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan dependensi dan risiko. Beberapa profesi, seperti desainer, ilustrator, konsultan, hingga dokter pada umumnya juga melaksanakan praktik mandiri di luar perusahaannya. Bukan hal jarang bagi pekerja untuk bekerja sampingan sebagai *online driver* saat tidak bekerja untuk menambah penghasilan. Hal tersebut memberikan keamanan dan penghasilan yang lebih bagi pekerja. Untuk sebagian besar masyarakat, tidak ada tuntutan untuk memilih salah satu saja, antara ekonomi konvensional atau *gig economy*. Walaupun belum ada regulasi atau serikat tempat pekerja *gig* bernaung dan berlindung, selama pekerja secara legal bisa memanfaatkan skema-skema ekonomi pasar kerja yang ada secara sekaligus untuk keuntungannya, maka mereka telah menyelamatkan dirinya sendiri. ■

Penulis merupakan Ketua Umum Badan Otonom Economica periode 2022

GIG ECONOMY: PEKERJAAN MASA DEPAN MANUSIA

Aurelia Julia Irvana, Nurul Sekararum, Alifia Yumna Mumtazah

TULISAN UTAMA I

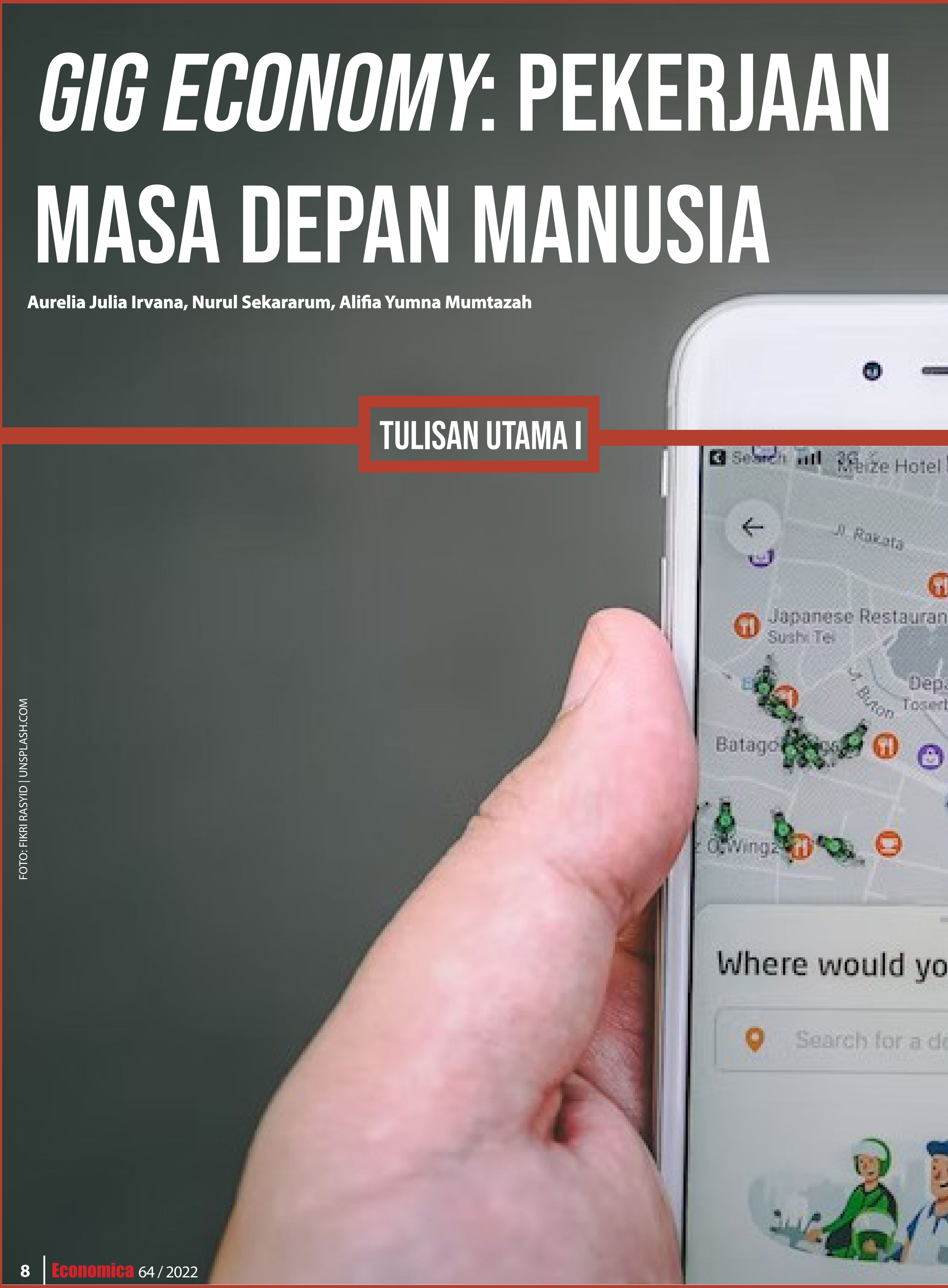

FOTO: FIKRI RASYID | UNSPLASH.COM

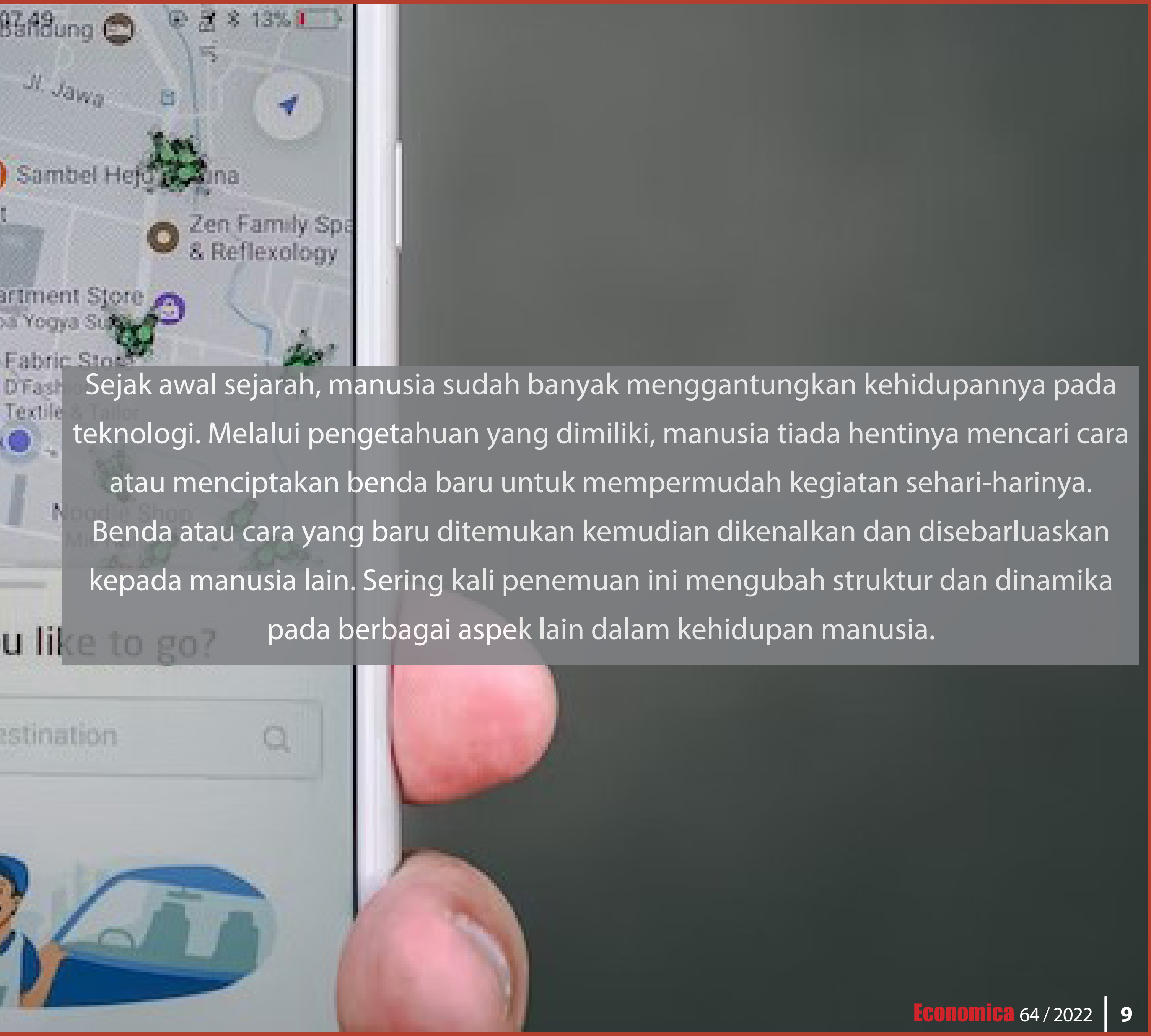

Sejak awal sejarah, manusia sudah banyak menggantungkan kehidupannya pada teknologi. Melalui pengetahuan yang dimiliki, manusia tiada hentinya mencari cara atau menciptakan benda baru untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Benda atau cara yang baru ditemukan kemudian dikenalkan dan disebarluaskan kepada manusia lain. Sering kali penemuan ini mengubah struktur dan dinamika pada berbagai aspek lain dalam kehidupan manusia.

FOTO: SVETIKD | UNSPLASH.COM

Empat Lompatan Teknologi Revolusi Industri

Perkembangan teknologi yang begitu cepat kerap membawa angin revolusi pada panggung perekonomian. Faktor produksi, salah satunya tenaga kerja, turut terdampak perkembangan teknologi. Struktur ketenagakerjaan diubrak-abrik oleh berbagai inovasi teknologi tanpa ada sinyal untuk melambat.

Banyak momentum yang bertanggung jawab atas arah perubahan dan kecepatan penggunaan teknologi dalam dunia kerja. Menurut pandangan Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Indonesia, Revolusi Industri memiliki peran yang penting dalam perubahan cara kerja manusia.

Revolusi industri modern pertama di Inggris terjadi pada akhir abad ke-18 ditandai dengan penemuan teknologi mesin uap yang mampu mengatasi segala keterbatasan biologis manusia untuk bekerja. Pada awalnya, menciptakan suatu produk membutuhkan tenaga manusia dan juga hewan. Namun sejak mesin uap ditemukan, kecepatan bekerja dan penciptaan produk meningkat jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Kemudian, satu abad setelah terjadi revolusi industri kedua dimana penemuan telepon, perkembangan teknologi kelistrikan, transportasi massal dan penggunaan mesin dalam lini perakitan memaksa mobilitas pekerja semakin cepat dan pekerjaan semakin terspesialisasi karena membutuhkan kemampuan atau *skill* khusus. Revolusi ketiga dimulai ketika pekerjaan manusia terkomputerisasi. Penggunaan komputer dan robot menggusur banyak pekerjaan manual menjadi otomatis.

Saat ini, manusia telah berada dalam revolusi industri keempat dengan memanfaatkan internet. Di era revolusi industri ini, kondisi VUCA *(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) mendorong dan mengharuskan terjadinya transformasi digital yang akhirnya membuka banyak pekerjaan baru untuk manusia.

Semuel menjelaskan bahwa pengaruh teknologi pada dasarnya bermuara pada efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Riani Rachmawati, Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. "Saat ini, peran teknologi sangat besar karena membuat perusahaan dapat lebih efisien dan menciptakan kehidupan pekerjaan yang lebih seimbang bagi para pegawai serta menjadi harapan baru pekerja muda," tutur Riani.

Perkembangan *Digital Economy* dan *Gig Economy* di Indonesia

Peran teknologi menjadi semakin esensial dan masif di masa pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang membatasi pertemuan fisik memaksa masyarakat harus mencari cara baru dalam berinteraksi. Menurut Riani, pandemi menjadi momentum akselerasi penerapan teknologi di dunia kerja akibat dari perusahaan yang harus tetap beroperasi bahkan dengan diskoneksi fisik yang terjadi. Perubahan orientasi ini menghadirkan tren terkait masifnya penggunaan teknologi digital, seperti *cloud computing*, *big data*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *machine learning*. Semuel menyebutkan angka pengguna internet di Indonesia meningkat drastis selama pandemi. Hal tersebut ditunjukkan dengan 21 juta pengguna internet yang baru muncul selama pandemi, 60,6% pengguna di antaranya melakukan transaksi secara *online*.

Saat ini, terjadi tumpang tindih antara istilah *gig economy* dengan *digital economy* di Indonesia sebagai akibat dari jaringan internet yang berhasil menjadi wadah sebuah gelombang aktivitas perekonomian baru (*new economy*). Dilansir dari Deloitte Digital, *digital economy* adalah aktivitas ekonomi yang berasal dari jutaan aktivitas daring, mulai dari hal yang berhubungan dengan bisnis, data, dan perangkat. Fondasi dari *digital economy* sendiri berasal dari konektivitas yang tinggi, yaitu meningkatnya keterkaitan antarorang, organisasi, dan mesin yang dihasilkan dari perkembangan *Internet of Things (IoT)*.

Sementara itu, *gig economy* yang berasal dari kata 'gig', istilah lazim yang menggambarkan pekerja di dunia hiburan dalam jangka waktu yang relatif pendek, lebih

mengacu pada ekonomi yang dihasilkan dari pekerjaan tidak terikat yang merupakan bagian dari *digital economy*. *Gig economy* dapat dijelaskan sebagai ekonomi berbasis pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (*freelancer*). Dengan kata lain, *digital economy* mendukung adanya perkembangan *gig economy*.

Dalam *gig economy,* terdapat berbagai jenis pekerjaan yang cakupannya sangat luas, mulai dari *ride hailing,* konsultan, *programmer*, *coach,* guru, hingga *sales* properti. *Gig economy* ini didukung oleh pertumbuhan *digital economy.* Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Google, pertumbuhan *digital economy* di Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 49 persen pada 2021 lalu. Peningkatan ini juga beriringan dengan kenaikan penetrasi internet di Indonesia sebesar 72 persen konsumen dari wilayah non-metropolitan. Dari riset yang sama, diperkirakan pada 2025 akan terjadi peningkatan sebesar 20 persen pada ekonomi digital di Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa sektor, yaitu *e-commerce,* layanan transportasi dan antar makanan, agen perjalanan *online*, serta media *online*.

Warna-Warni Gaya Kerja *Gig Economy*

Kehadiran *gig economy* sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 2010-an, ketika aplikasi-aplikasi penyedia lowongan pekerjaan *remote* seperti Upwork dan Fiverr hadir kemudian digunakan secara massal. Riana menyebutkan bahwa gaya pekerjaan *gig* ada sebelum Revolusi Industri keempat, pembedanya saat ini adalah transaksi dilakukan melalui teknologi atau mediator transaksi pekerjaan, yakni aplikasi. Ia juga menyebutkan kontrak pekerja *gig* berbasis pada volume pekerjaan dengan ciri khas *end-to-end*. Misalnya, ojek *online* yang hanya bekerja apabila ada *order* yang masuk pada aplikasi atau *freelancer designer* yang membuat ilustrasi jika ada pesanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, transisi yang paling terasa dari *gig economy* adalah munculnya aplikasi ojek *online* yang sekarang menjadi transportasi alternatif favorit. Meskipun demikian, menurut Riana, pekerjaan gig tidak hanya ada pada sektor transportasi, melainkan juga pada industri kreatif dan edukasi. Tren ini berkembang seiring dengan perubahan preferensi masyarakat akan fleksibilitas dan kenyamanan layanan.

"Ekonomi berbasis pekerja lepas adalah pekerjaan masa depan."

Menurut Semuel, Generasi Z (lahir 1997 - 2012) yang notabenenya adalah *digital native* dan berada pada usia produktif (18-23 tahun), merupakan kelompok umur yang paling terdampak. Mereka yang memilih pekerjaan lepas menganggap sistem fleksibel ini menawarkan penghasilan tambahan dalam waktu singkat yang juga mengedepankan independensi dan kreativitas sebagai bentuk aktualisasi diri. Namun demikian, Riana menyebutkan bahwa Generasi Z, walaupun melihat pekerja lepas sebagai alternatif pekerjaan yang baik, juga menghargai kepastian dan keamanan kerja yang nyatanya sulit terjamin dengan sistem *gig*.

"Sistem gig economy ini bagus untuk Indonesia, tetapi kita harus paham bahwa kita bersaing dengan negara lain, seperti Korea, Vietnam, India yang sudah lebih mampu menghadapi pekerja gig di negaranya."

Secara khusus, perubahan ekonomi *gig* juga meluas ke pemilik usaha UMKM. Semuel mencontohkan proses sewa kontraktor dari pekerjaan satu ke lainnya dapat diakses hanya dengan sentuhan tombol dan penyelesaian pembayaran pada *online platform* milik pihak ketiga. Dengan ini, pengelolaan bisnis UMKM menjadi lebih efektif dan efisien. Semuel menyebutkan bahwa teknologi digital membawa kemudahan bekerja secara konsisten sebagai pekerja lepas.

Realita *Gig Economy* di Masa Kini

Ekspektasi terkadang tidaklah sesuai dengan realita yang terjadi. Sistem *gig* memiliki celah yang tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, melainkan juga pihak perusahaan. Satu orang pekerja lepas dapat menerima pekerjaan dari berbagai klien sehingga memperbesar kerawanan atas bocornya data yang nantinya akan merugikan perusahaan.

"Saya rasa sistem *gig economy* ini bagus untuk Indonesia, tetapi kita harus paham bahwa kita bersaing dengan negara lain, seperti Korea, Vietnam, India yang sudah lebih mampu menghadapi pekerja *gig* di negaranya. Jadi, faktualitas dari pekerjaannya seperti profesionalisme dan etika bisnis harus ditingkatkan dan dijaga karena tanpa hal tersebut, kita akan ketinggalan," tutur Semuel.

Dari sisi penawaran tenaga kerja, kurangnya talenta digital di Indonesia menjadi isu tersendiri yang mempersulit proses penyerapan tenaga kerja. Menurut Semuel, dalam masa transisi transformasi digital yang begitu cepat ini, Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 talenta digital.

Riani menjelaskan *gig economy* yang terjadi pada pasar bebas tenaga kerja dengan teknologi sebagai komplementer, menyebabkan interaksi antara pemberi kerja dan pekerja tidak diatur oleh birokrasi dan proses hukum yang rumit. Namun demikian, sistem yang lebih terdesentralisasi-yang kerap diagungkan oleh beberapa pihak sebagai bagian dari demokrasi yang sempurna-rupanya juga membawa kegelisahan bagi berbagai kalangan masyarakat.

Belakangan, *gig economy* semakin banyak diterapkan oleh perusahaan. Di Amerika sendiri, terdapat lebih dari 57 juta pekerja yang merupakan bagian dari *gig economy*, seperti dikutip dari Forbes. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik pada Mei 2019, jumlah pekerja lepas di Indonesia ada sekitar 5,89 juta orang. Jumlah ini meningkat pesat menjadi 33,34 juta orang menurut BPS di tahun 2020. ■

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Semuel Abrijani Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kemkominfo Indonesia

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Riani Rachmawati
Dosen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

FOTO: FASYAH HALIM |UNSPLASH.COM

TULISAN UTAMA II

MANIS PAHITNYA *GIG ECONOMY* DI INDONESIA

Raka Yuda Priyangga, Trinita Riana Sitorus, Kleovan Nathanael Gunawan

Kebijakan pembagian hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk pengemudi ojek online (ojol) cukup merayu banyak orang untuk mengadu nasib menjadi pengemudi ojol. Namun, status mereka sebagai pekerja lepas yang hanya diakui perusahaan sebagai "mitra", bukan karyawan, membuat mereka harus menanggung biaya operasional ojol dari kantongnya sendiri. Tentunya, biaya bahan bakar, kuota internet, dan risiko perjalanan bukanlah hal yang murah untuk ditanggung sendiri. Lantas, bagaimana nasib pekerja lepas Indonesia seperti para pengemudi ojol tersebut?

Sejak dulu, perkembangan teknologi ikut membawa perkembangan ekonomi, baik dari pertambahan sektor maupun perubahan struktur yang ada. Perkembangan teknologi membuat manusia dapat bekerja di mana saja dan kapan saja, tergantung kebutuhan pasar. Hal ini membawa manusia kepada suatu konsep ekonomi yang disebut *gig economy*. Dalam konsep ekonomi ini, para pekerja menjadi *self-employed* yang tidak terikat dengan perusahaan manapun. Mereka bekerja berdasarkan permintaan dalam rentang waktu tertentu.

Sisi Manis Gig Economy

Digital economy yang menjadi penyokong *gig economy* memberikan dampak positif pada perekonomian, terutama pada masa pandemi ini. Dalam aspek makro, *gig economy* membuka begitu banyak peluang bagi para tenaga kerja independen. Penyerapan tenaga kerja ini akan berkontribusi pada pengurangan pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi akibat keterbatasan informasi antara pelamar dan pemberi kerja. Dengan begitu, kehadiran *gig economy* memberikan manfaat dari segi pendapatan negara dan pengurangan pengangguran.

Gig economy juga memberikan manfaat bagi perusahaan. "Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pekerja dengan kemampuan yang sesuai dan biaya yang lebih rendah," jelas Rina Safitri, HR Business Partner Garena Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran *gig workers* juga membuat perusahaan bisa menurunkan kebutuhan akan kantor atau tempat kerja.

Sementara itu, bagi para pekerja, *gig economy* menawarkan fleksibilitas dengan sistem kerja yang *remote*. Sistem ini membuat pekerja bisa mengatur sendiri waktu kerja serta tempat kerja mereka. Pekerja juga menjadi lebih independen dengan bekerja di *gig economy*, karena komitmen mereka kepada perusahaan lebih kecil.

Pil Pahit Gig Economy

Walaupun, untuk upah yang lebih rendah, *gig workers* harus bekerja lebih lama untuk mencukup kebutuhan. Ditambah, *gig workers* juga tidak menerima *security, benefit*, serta harus membayar pajaknya sendiri.

Terlepas dari segala manfaat yang ditawarkan, penerapan *gig economy* di Indonesia menghadapi beberapa masalah. "(Indonesia) perlu membangun infrastruktur internet karena *gig economy* perlu *digital economy*. Program pembangunan infrastruktur masih *mandek* sehingga terdapat tantangan tersendiri. Selain itu, masih terdapat ketimpangan akses terhadap internet, listrik, infrastruktur logistik sehingga menghambat pertumbuhannya," jelas Stella Kusumawardhani, Economic Research Lead Tenggara Strategics.

Salah satu masalah yang paling umum dihadapi adalah rendahnya kecepatan internet. Hal tersebut menjadi masalah karena *gig economy* sangat memanfaatkan internet. Buruknya kondisi internet di Indonesia membuat terhambatnya perkembangan *gig economy*. Berdasarkan data dari Speedtest Global Index, per Juni 2022, kecepatan internet di Indonesia hanya 21,68 Mbps dengan urutan ke-119 dari seluruh negara di dunia.

Selain masalah internet, permasalahan pemerataan infrastruktur listrik juga menjadi "pekerjaan rumah" bagi Indonesia. Pada 2022, tercatat, ada 4700 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. " Masih terdapat pulau yang tidak memiliki akses terhadap internet, listrik, infrastruktur logistik. Sehingga negara kepulauan memberikan tantangan seperti internet listrik, logistik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi digital," ungkap Stella.

Selain kedua masalah tersebut, pendidikan juga menjadi masalah terkait *gig economy*. *"Indonesia masih memiliki gap akibat kurikulum yang masih kuno. Problem solving dasarnya itu critical thinking yang masih kurang sehingga pekerja di Indonesia masih kurang kompetitif," terang Stella. Gap* antara kurikulum di Indonesia yang masih terbilang kuno dengan banyaknya tuntutan di dunia kerja masih perlu dibenahi.

> *"Gig economy saat ini mengkhawatirkan, tetapi Indonesia memiliki angka pengangguran yang tinggi (karena kesempatan kerja yang terbatas). Akibatnya, (bagi mereka menjadi) gig workers ini lebih baik daripada menganggur."*

Dari sudut pandang perusahaan, terdapat masalah yang mungkin timbul dari mempekerjakan *gig workers*. Kemungkinan *gig workers* meninggalkan perusahaan sebelum *project* selesai serta munculnya *ethical issue*. Selain itu, karena semakin banyak perusahaan yang tertarik menggunakan *gig workers*, perusahaan harus menyediakan fasilitas dan skema insentif yang lebih baik untuk menarik pekerja. "Sekarang mereka mencoba untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik, skema insentif yang lebih banyak, dll. Untuk menarik orang untuk menjadi gig eco mereka," jelas Rina. Lebih lanjut Rina juga menjelaskan bahwa perusahaan harus menyelaraskan budaya serta cara kerja perusahaan kepada *gig workers.*

Dari sisi karyawan, Rina berpendapat bahwa terdapat juga beberapa masalah dengan menjadi gig workers. Tidak adanya kepastian kerja dan tidak ada benefit tambahan yang biasanya didapat karyawan tetap menjadi hal-hal yang *gig workers* hadapi.

FOTO: AFIF RAMDHASUMA | UNSPLAS.COM

Intervensi yang Dilakukan Pemerintah

Pemerintah telah membuat program pembangunan untuk mengatasi masalah kondisi internet dan pemerataan infrastruktur tersebut. Dari segi kecepatan internet, pemerintah telah membangun 12.548 *base transceiver station* (BTS), menggelar jaringan kabel serat optik melalui Palapa Ring Integrasi, meluncurkan satelit SATRIA-I pada 2023, dan menyediakan jaringan 5G di 13 kota di Indonesia. Akan tetapi, pembangunan BTS mengalami kemandekan. Terkait kelistrikan, PLN meminta alokasi Rp10 Triliun pada Penyertaan Modal Negara untuk pembangunan infrastruktur listrik. Selain itu, melalui RUPTL PLN 2021-2023, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 40,6 GW dalam 10 tahun mendatang.

Dalam mengatasi masalah pendidikan Indonesia, pemerintah juga menerapkan beberapa program. Salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan adalah program Kampus Merdeka. Namun, Stella menilai bahwa program ini memakan waktu yang lama untuk terlihat hasilnya.

Apa Kabar *Gig Workers* Indonesia?

Walaupun terdapat perkembangan jumlah pekerja gig di Indonesia, hal ini tidak serta merta menjamin keberhasilan para pekerjanya. Kondisi pekerja gig di Indonesia masih kurang baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut East Asia Forum, *gig economy* di Indonesia tidak memenuhi *gig work principle* yang terdiri atas *fair pay, fair conditions, fair contract, fair management,* dan *fair representation*. Salah satu contohnya adalah rendahnya tarif per kilometer pada sektor *ride hailing*/ojek *online* di Indonesia. Tarif tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, misalnya Singapura.

Di samping permasalahan tersebut, *gig economy* berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. "*Gig economy* saat ini mengkhawatirkan, tetapi Indonesia memiliki angka pengangguran yang tinggi (karena kesempatan kerja yang terbatas). Akibatnya, (bagi mereka menjadi) gig workers ini lebih baik daripada menganggur. Walaupun, gig workers juga bukan hal yang baik karena kondisi pekerjanya saat ini," jelas Stella. Kesempatan bekerja dalam dunia *gig economy* juga memberikan peluang untuk tidak jatuh dalam kemiskinan pada pandemi ini. Pekerjaan di *gig economy* juga memberikan fleksibilitas dengan adanya sistem *bekerja secara remote,* meski hal ini justru bisa berakibat pada komitmen yang rendah.

Dari sisi bisnis, banyak perusahaan yang hanya memberikan insentif menggiurkan yang bersifat sementara kepada para pekerja gignya, khususnya untuk *unskilled workers*-padahal banyak yang lebih mengincar insentif jangka pendek atau harian. Hal ini membuat begitu, banyak orang yang tertarik bergabung menjadi mitra perusahaan tanpa memikirkan keberlanjutan dan kondisi kerja yang layak sehingga berdampak pada eksploitasi pekerja. Selain itu, Perusahaan pun sering memberikan insentif semu. Contohnya adalah pemberian asuransi bagi para pekerja *ride hailing* yang di mana sebenarnya asuransi tersebut tetap dibayar oleh para pekerja tersebut. Di sisi lain, *high-skilled worker* dalam *gig economy* malah mendapatkan insentif yang lebih, seperti asuransi dan *operational support*. "untuk *high-skilled worker*, seperti konsultan lepasan, *coach*, *teachers*, *sell/rent property*, itu mereka dibayar cukup mahal, meski masih tergantung pengalamannya. terus, mereka juga bisa ambil beberapa pekerjaan dalam satu waktu," jelas Rina.

"*Gig economy* itu membantu untuk mengatasi kemiskinan, bertahan di masa pandemi, tapi apakah pekerjaan kita selesai sampai disitu? tidak kan. Kita tidak mau *gig economy* membawa bayangan gelap yaitu kondisi pekerja yang tereksploitasi, kita tidak mau membangun perekonomian diatas penderitaan *gig workers* karena sama dengan membangun negara maju dari perbudakan. Dilihat secara makro, (*gig economy)* untuk negara itu baik tapi secara labor economicnya bermasalah," pungkas Stella.

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Stella Kusumawardhani
Economic Research Lead
Tenggara Strategics

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Rina Safitri
HR Business Partner
Garena Indonesia

GIG ECONOMY:

REGULASI, EKSPEKTASI, DAN EVALUASI

Phylicia Febian, Tara Saraswati, Jeni Rima Puspita

TULISAN UTAMA III

FOTO: VISUAL KARSA | UNSPLASH

Ojek online menjadi salah satu moda transportasi yang populer bagi berbagai kalangan, terutama masyarakat ibu kota. Popularitasnya ini mendorong banyaknya orang yang memilih bekerja menjadi pengemudi ojek online, yang termasuk dalam kategori pekerja gig. Meskipun popularitas pekerjaan ini meningkat, beberapa kali para pengemudi ojek online berkumpul dan melakukan demonstrasi. Sistem kerja yang dijalankan para pengemudi ojek online dan nasib kehidupan mereka menjadi sesuatu patut dipertanyakan.

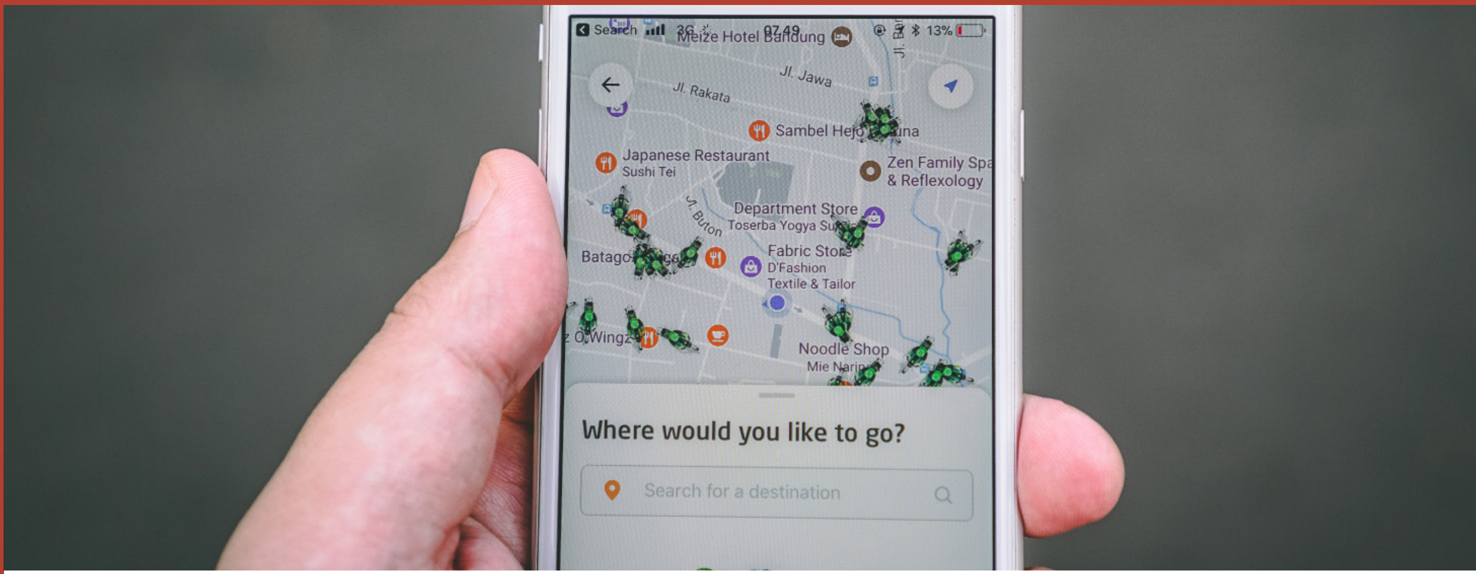

FOTO: FIKRI RASYID | UNSPLASH.COM

Gig economy menghadirkan formulasi pola hubungan kerja baru, yang menjadikan fleksibilitas sebagai komponen yang jauh lebih penting dibanding *sustainability*. Pola tersebut tidak lagi didasarkan pada eksklusivitas pemakaian tenaga kerja untuk jangka panjang seperti pola hubungan ketenagakerjaan konvensional. Dari pola hubungan kerja baru tersebut, timbul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh pekerjanya. Masalah utamanya, mereka tidak memiliki kepastian dalam hal pendapatan. Selain tidak adanya kepastian pendapatan, pekerja gig seperti pengemudi ojek *online* juga tidak mendapatkan perlindungan seperti cuti sakit, pesangon, kontribusi asuransi BPJS dari perusahaan, dan lainnya. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai bahan evaluasi penerapan *gig economy* di Indonesia.

> *"Pekerja-pekerja yang kebanyakan merupakan lulusan pendidikan menengah berangkat dengan pola pikir bahwa bekerja itu adalah sebagai karyawan. Sementara, perusahaan sebenarnya hanya menyediakan platform"*

Seberapa Lengkap Regulasi Kita Mengatur *Gig Economy*?

Adriani, S.E., Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan, berpendapat bahwa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia sudah berkembang dengan cukup baik. Undang-Undang Cipta Kerja telah menyempurnakan peraturan bagi pekerja *gig* yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Kita mengatur waktu kerjanya, mengatur upah per bulannya, mengatur uang kompensasi bagi yang bukan pegawai tetap melainkan yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Semua ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja," tutur Adriani.

Ahmad Maulana, Advokat *Labor Law* di Assegaf Hamzah & Partners, juga berpendapat bahwa UU Cipta Kerja sudah lebih baik bagi pekerja *gig economy*. "Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pekerja harian maupun bulanan di dalam undang-undang lama, yaitu dalam Undang-Undang 2003 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja," tutur Alan. UU Cipta Kerja memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dan lebih mengakomodasi karyawan yang dibayar secara harian.

Namun, Joanna Octavia, Doctoral Researcher di Warwick Institute for Employment Research, melihat bahwa UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja belum cukup mengakomodasi *gig workers* dan definisi kemitraan yang diusung oleh *gig economy*. Menurut pengamatannya, UU Cipta Kerja tidak memberikan dampak yang signifikan bagi *gig workers* seperti pengemudi ojek *online*. Perkembangan regulasi *gig economy* di Indonesia juga dirasa oleh Joanna cukup terlambat. "Regulasi yang kita punya *is very bits and pieces*. Kalau pas dituntutnya bagian itu, akan diregulasi, tetapi *gak* berarti bagian-bagian lainnya diregulasi," ujar Joanna.

Bagaimana Persepsi dan Ekspektasi Pekerja terhadap *Gig Economy*?

Menurut Alan, banyak pekerja gig yang belum memahami sesungguhnya perjanjian kontraktual yang mereka jalani. "Pekerja-pekerja yang kebanyakan merupakan lulusan pendidikan menengah berangkat dengan pola pikir bahwa bekerja itu adalah sebagai karyawan. Sementara, perusahaan sebenarnya hanya menyediakan *platform*," kata Alan.

Perusahaan yang berfungsi sebagai *platform* seringkali memberikan konsekuensi negatif, yang bagi Alan, membuat persepsi pekerja lebih kacau. "Kalau misalnya dia cuma membuka aplikasi kurang dari lima jam dari satu hari maka dia kena denda, kena potongan admin lebih besar, atau segala macam," ujar Alan. "Mereka merasa mendapat hukuman dari perusahaan, jadi seolah-olah dia adalah seorang karyawan."

Joanna juga menyampaikan adanya permasalahan mengenai konsekuensi negatif yang diberikan perusahaan. "Kalau dianggap melakukan pelanggaran, pekerja gig yang bergantung pada aplikasi bisa kapan saja kehilangan akses kepada aplikasi tersebut, misalnya kena *suspend*, *termination*, padahal aplikasi itu yang mereka gunakan untuk mencari nafkah," ucap Joanna.

Alan memaparkan bahwa perlu adanya manajemen ekspektasi bagi pekerja *gig* dan meluruskan pemahaman mereka mengenai pekerjaan yang mereka jalani. "Apakah pihak yang bekerja itu punya pemahaman yang sama dengan perusahaan yang kemudian memberikan pekerjaan untuk dijalankan? Kalau misalnya tidak sama, ya tidak ketemu. Makanya menjadi isu seolah-olah si pekerjanya merasa, 'Wah mana perlindungan buat saya? Saya kan bekerja,'" jelas Alan.

Apakah Perlu Pekerja *Gig* Menjadi Pekerja Tetap?

Joanna melihat bahwa mengklasifikasikan pekerja *gig* di Indonesia sebagai pekerja tetap bukanlah ide buruk dan mungkin bisa dicoba. Hanya saja, Joanna mengkhawatirkan kesediaan dari platform dan karakteristik perekonomian Indonesia untuk memenuhi klasifikasi baru terse-

> *Perusahaan teknologi ingin berinovasi, ingin segala* resources *itu dihabiskan untuk melakukan inovasi. Bukan kegiatan administratif mengurus* human resources *ribuan orang.*

but. "Apabila seandainya mereka dijadikan *full-time employee*, belum tentu *platform* yang tersedia dapat mengakomodasi dari segi *benefit* maupun tunjangan. Selain itu, karena karakteristik perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh sektor informal, sepertinya belum memungkinkan untuk mengklasifikasi pekerja *gig* di Indonesia sebagai full-time employee sebab hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus mengurangi jumlah pekerja yang ada dan mereka hanya menjadi pekerja biasa yang digaji bulanan," kata Joanna. Dengan kata lain, menjadikan gig workers sebagai *full-time employee* justru memudarkan konsep *gig economy*.

Kesiapan perusahaan selaku *platform* juga dirasa meresahkan bagi Alan jika pekerja *gig* diubah menjadi pekerja tetap. "Perusahaan teknologi ingin berinovasi, ingin segala *resources* itu dihabiskan untuk melakukan inovasi. Bukan kegiatan administratif mengurus *human resources* ribuan orang," ujar Alan.

Alan menjelaskan bahwa konversi menjadi pekerja tetap sangat tergantung kebutuhan masing-masing pekerja. Namun, Alan mengingatkan bahwa fleksibilitas yang didapatkan dari konsep *gig economy* perlu diserahkan jika sudah menjadi pekerja tetap. "Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu didefinisikan bahwa hubungan kerja adalah hubungan berdasarkan perjanjian kerja yang komponennya adalah pekerjaan, perintah, dan upah. Jadi, hubungan kerja itu memang hubungan untuk menjalankan perintah atas pekerjaan tertentu dan karenanya menimbulkan hak untuk menerima upah dari sisi pekerja," tutur Alan.

Tantangan dan Evaluasi Bersama

Saat ini, pekerja *gig* di Indonesia sudah bisa merasakan perlindungan layaknya pekerja tetap. Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki skema Bukan Penerima Upah (BPU) yang ditujukan kepada *independent workers* seperti pekerja *gig*. Pekerja *gig* dapat mendaftarkan diri dan membayar sendiri biaya bulanan yang mencakup jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. "Jadi sebenarnya, kalau pun *gig workers* tetap mau *maintain flexibility*, dia tetap punya saluran untuk mengupayakan *security-security* tadi," kata Alan.

Meskipun dari segi perlindungan sudah terlihat adanya kemajuan, masih banyak tantangan untuk meregulasi pekerja *gig* di Indonesia. Dari sudut pandang perusahaan, perusahaan masih perlu merapikan kontrak dan sistem yang ia buat untuk para pekerja *gig*. "Mereka (perusahaan) harus lebih transparan terhadap pekerjanya, misalnya perbedaan jumlah pesanan antar *driver* ojek *online* yang belum diketahui penyebabnya. Yang tidak kalah penting adalah mengikutsertakan para pekerja dalam berorganisasi, dengan artian mereka dapat lebih dianggap dan diakomodasi oleh perusahaan," ujar Joanna. Para pekerja dapat bergabung dan membentuk suatu komunitas untuk menyuarakan pendapat mereka.

Dari segi pemerintah, Joanna melihat perlunya *political commitment* untuk mengevaluasi dan memperbaiki regulasi *gig economy* di Indonesia. Beragamnya jenis pekerjaan, karakteristik individu, dan sektor yang terlibat di dalam *gig economy* juga menjadi suatu tantangan tersendiri. "Sebaiknya diadakan *crosscheck per coordination* di antara beberapa kementerian terkait karena masing-masing sektor saling berhubungan," kata Joanna. Dalam menyelesaikan permasalahan ojek *online* misalnya, diskusi perlu melibatkan berbagai kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan.

Dalam menyusun peraturan-peraturan, Kementerian Ketenagakerjaan banyak belajar dari peraturan yang sudah berlaku di negara lain. Adriani berkaca kepada sistem kerja di Australia, di mana sejak tahun 1990-an, upah per jam kerja sudah diatur jelas tergantung jenis pekerjaannya. Pajaknya juga diatur jelas beserta pengembalian pajak di akhir tahun. "Kita libatkan mitra-mitra kita yang mestinya kita dengarkan masukannya, termasuk lembaga-lembaga internasional yang mempunyai banyak informasi mengenai bagaimana kondisi di luar negeri, supaya itu bisa menjadi referensi buat kita," ujar Adriani.

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Joanna Octavia
Doctoral Researcher
Warwick Institute for Employment Research

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Adriani, S.E.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
Kementerian Ketenagakerjaan

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Ahmad Maulana
Advokat Labor Law
Assegaf Hamzah & Partners

THE RISE OF GIG ECONOMY IN WORLDWIDE

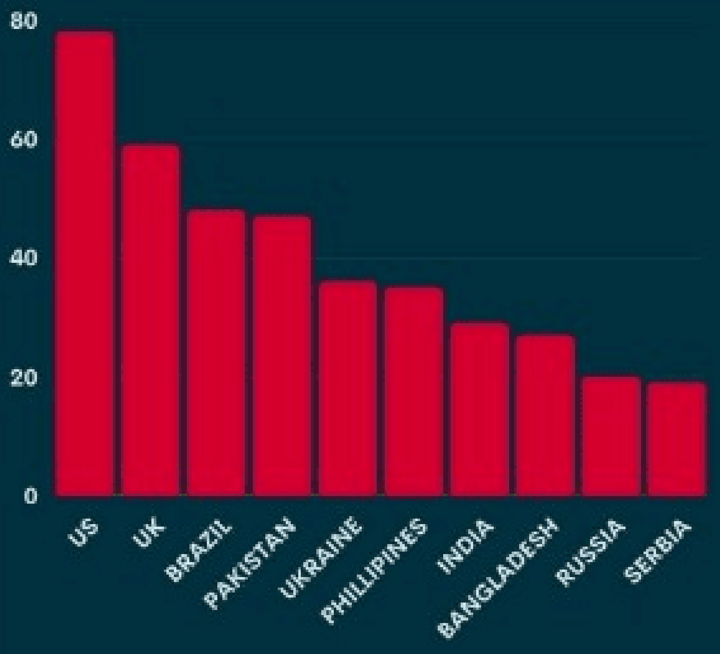

Top 10 countries for freelancing

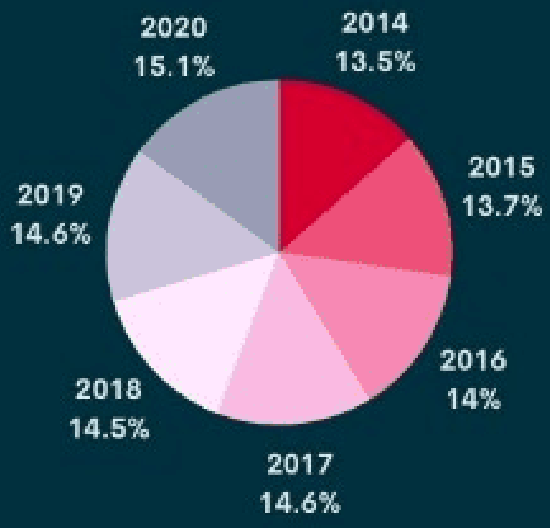

Number of people doing freelance work

Di negara berkembang, penggunaan platform gig economy telah meningkat lebih dari **30%.**

Gig Economy sangatlah beragam karena memiliki market yang besar dan diperkirakan menghasilkan **$455,2 miliar** pada tahun 2023, yang hampir dua kali lipat dari nilai tahun 2018. Secara keseluruhan, gig economy tumbuh tiga kali lebih cepat daripada tenaga kerja tradisional.

COVID turut menyoroti manfaat kerja jarak jauh dan penjadwalan fleksibel yang cenderung dinikmati oleh para pekerja gig economy. Saat senang, pekerja gig economy juga bisa terlibat secara aktif, dan perusahaan dengan tenaga kerja yang terlibat cenderung mengungguli pesaing hingga **202 persen!**

SOURCE: ASEANTODAY.COM ACIPERSPECTIVES.COM SITEEFY.COM

THE BENEFIT AND STRUGGLE

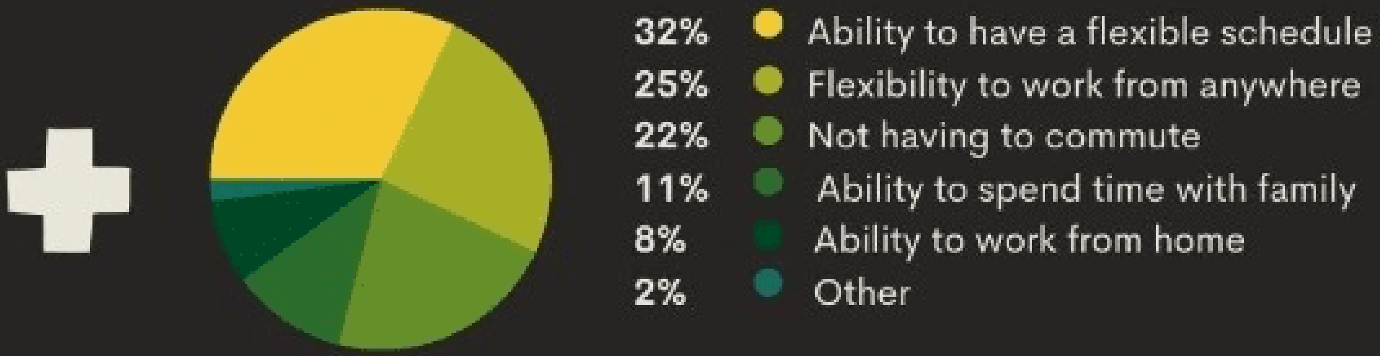

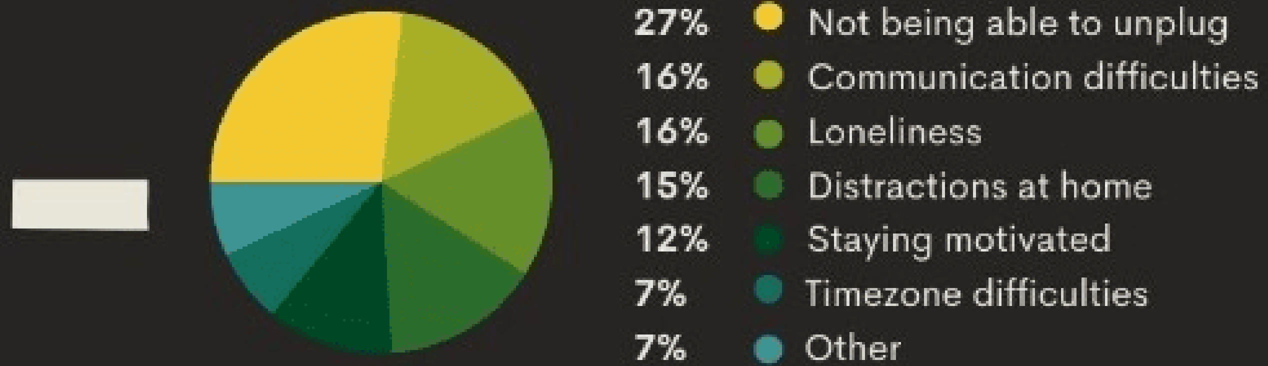

POPULAR SECTORS

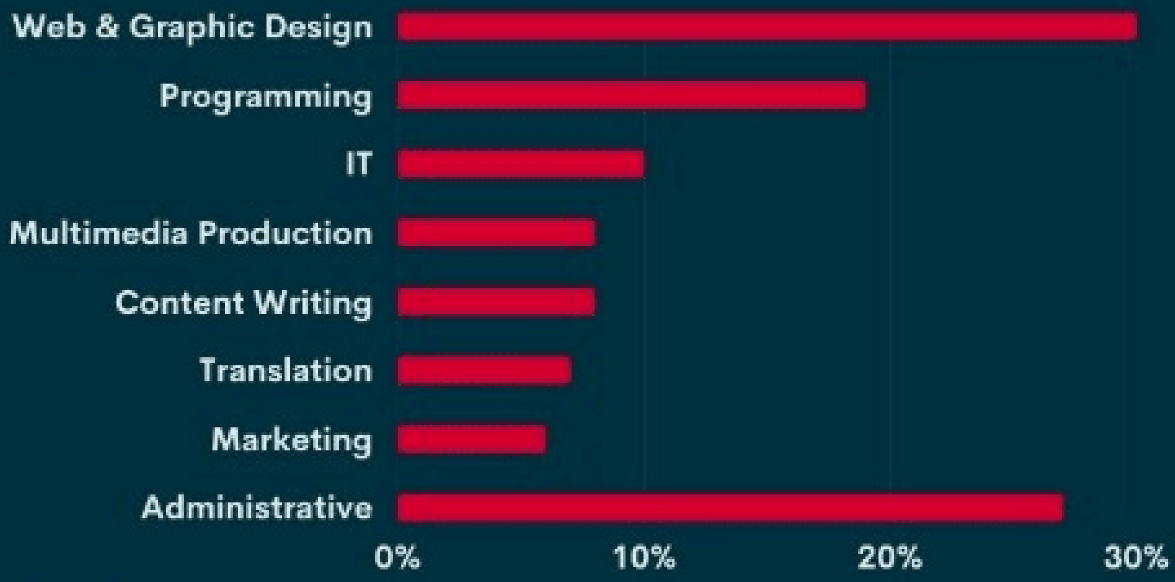

ILUSTRATOR: ELIZABETH ALVITA | ECONOMICA

Pada sektor lain :

58% dari gig economy berasal dari layanan berbasis transportasi seperti ridesharing dan carpooling.

FOTO: SAID | PEXELS.COM

MENGHITUNG DERMA YANG SIA-SIA

Divisi Kajian

Narasi berbuat baik tampaknya akan selalu berkembang dengan cara-cara baru dalam mendefinisikan maupun memaknai tindakan. Cerita tentang bagaimana seorang terpandang memotivasi pengikutnya dengan terus-menerus membawa nama Tuhan, mengkuantifikasi makna ajaran-Nya, dan terkadang memastikan karunia-Nya kepada pengikut yang kebingungan, menjadi fenomena yang sangat kekinian dan materialistik. Fenomena yang diangkat seorang terpandang muslim ini akhirnya membuahkan perbincangan baru terkait makna berbuat baik, khususnya sedekah.

Motif sedekah yang beragam menimbulkan pemikiran lebih jauh tentang sedekah itu sendiri. Diskursus tentang cara memberi yang benar selalu menarik untuk dibahas. Ketika sedekah dapat ditujukan untuk berbagai hal, apakah ketulusan dan kemurnian hati untuk benar-benar membantu tidak akan pernah ada? Memikirkan kembali makna sedekah mungkin terkesan buang-buang waktu. Namun, menjadi kepuasan tersendiri ketika makna dari tindakan tersebut dapat terungkap atau sedikit terungkap.

Altruisme (Efektif): Memikirkan Sedekah Lebih Jauh

Altruisme secara sederhana bermakna mengutamakan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri. Altruisme merupakan bagian dari sikap prososial, yang dimaknai sebagai tindakan umum memberikan bantuan kepada orang lain terlepas dari motif pemberi. Altruisme dapat berkembang pada diri seseorang atas dasar empati, yang didefinisikan sebagai sikap inheren tanpa syarat dalam diri altruis. Charles Daniel Batson menyampaikan tiga model Batson yang melihat empati sebagai motivasi yang mendorong altruisme. Model pertama, yaitu seseorang menginginkan penghargaan sosial atau pribadi. Model kedua, yaitu seseorang berusaha menghindari hukuman. Model ketiga, seseorang berusaha mengurangi dampak penderitaan akibat empati.

Motivasi bertindak altruis, di antaranya dapat dilihat dari perspektif evolusioner, yaitu individu bersikap altruistik demi melanjutkan kelangsungan kehidupan. Selain itu, norma-norma sosial dan *modelling* menjadi motivasi selanjutnya dalam tindakan altruistik. Norma-norma sosial sebagai motivasi altruistik dapat dilihat dari contoh lingkungan yang secara turun-temurun mewariskan tanggung jawab sosial. *Modelling,* sebagai motivasi tindak altruistik dimaknai dengan proses peningkatan efikasi diri kemampuan mencapai tujuan secara mandiri yang bertujuan sebagai keyakinan diri akan kemampuannya menolong orang lain.

Melihat motivasi yang demikian, tersirat pertanyaan, "Apakah tindakan altruisme benar-benar "mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri sendiri?" Atau lebih lanjut, "Apakah altruisme secara konsep dapat diwujudkan?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut Krebs tanggapi dengan kritik yang mendasar. Jawabannya cukup tegas, bahwa tidak ada kesimpulan yang tepat di balik altruisme yang dinilai sebagai "tindak mengutamakan orang lain daripada diri sendiri." Kompleksitas pengalaman dan situasi yang membentuk nilai pada manusia menghasilkan makna "mengutamakan orang lain daripada diri sendiri" yang berbeda-beda.

Kompleksitas kehidupan manusia yang makin berkembang serta pertanyaan tentang cara memberi yang benar pada akhirnya menelurkan pemikiran sekaligus gerakan baru pada kalangan altruis. Altruisme efektif merupakan komunitas berkembang yang digagas oleh Peter Singer dan William MacAskill yang didasarkan pada ide "melakukan yang terbaik yang kita bisa.". Tindakan sederhana yang digunakan altruisme efektif adalah tentang bagaimana menyumbang ke badan amal akan berpotensi menyelamatkan jauh lebih banyak orang daripada menyumbang perseorangan, ini yang kemudian disebut sebagai "efektif". Namun demikian, akan terdapat bahasan terkait sejauh mana altruisme efektif ini "berefek", serta adanya potensi pengabaian mendasar tentang masalah moral seperti ketidakadilan, dan sebagainya.

Altruisme efektif menyatakan keefektifannya secara tidak langsung dengan menegaskan bahwa gerakan ini ditujukan

untuk berbuat baik dengan lebih baik. *The Effective Altruism Handbook* karya Singer dan MacAskill menjelaskan bahwa gagasan altruisme efektif muncul secara alami dari berbagai pengembangan terkini pada bidang ekonomi, psikologi, dan filsafat moral. Kewajiban menggunakan sumber daya untuk mengurangi kemiskinan global dan memperluas "lingkaran moral", yaitu dengan memberikan bobot moral kepada orang asing, orang masa depan, dan hewan atau non manusia menjadi argumentasi yang dikemukakan Singer.

Singer menyatakan bahwa kewajiban moral haruslah sama, baik kepada orang terdekat maupun orang lain yang jauh. Selanjutnya, jika seseorang merasa menyelamatkan anak dari kolam merupakan bentuk pemenuhan kewajiban moral, maka kepada orang lain yang jauh, kewajiban tersebut pun perlu dipenuhi dengan memberikan uang kepada mereka yang membutuhkan. Kesimpulan yang Singer ambil adalah, "Memberi banyak uang merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan pemenuhan kewajiban moral". Tentu kesimpulan tersebut menimbulkan banyak keraguan.

Singer menyampaikan argumen terkait kesimpulannya, yaitu ketika terdapat asumsi bahwa memberi kepada orang yang membutuhkan merupakan tanggung jawab otoritas, dan dengan menolak memberi dapat memotivasi otoritas untuk melakukan tugasnya memberi, maka reaksi yang belum dapat dipastikan tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang menolak memberi. Maka, pada akhirnya kewajiban moral tersebut tetap berada pada diri sebagai individu.

Singer menyatakan bahwa kewajiban moral berasal dari asumsi-asumsi. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa terdapat prinsip-prinsip moral mendasar yang merupakan aksioma, yang dipegang melalui kapasitas penalaran manusia. Salah satu aksioma tersebut adalah kesejahteraan setiap orang sama adalah sama pentingnya, dan karena itu tiap individu terikat untuk menganggap kesejahteraan tersebut layaknya milik individu sendiri.

Motivasi tindakan altruistik pada manusia juga dapat dilihat melalui perspektif Evolusioner. Evolusi, jika dilihat lebih jauh, mungkin bukan "motivasi", melainkan efek dari suatu motivasi yang bernama "tujuan hidup". Evolusi menjadi efek dari pemaknaan hidup umat manusia sejak awal spesies ini berada di bumi. Menurut Singer, banyak orang yang akhirnya mengikuti gerakan altruisme efektif sebagai cara memaknai hidup.

Kapitalisme sebagai Pembentuk Makna

Ketika altruisme efektif hanya diterjemahkan dengan peraturan-peraturan kapitalistik, maka altruisme efektif berpotensi menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan fenomena kemiskinan pada akhirnya 'tak akan pernah direnungkan dengan cara lain selain pengaturan kapitalistik. Ide tentang menghadirkan sistem ekonomi lain untuk menerjemahkan altruisme kepada bentuk yang berbeda sering kali dibincangkan, tetapi nantinya akan ada hal-hal mendasar yang juga berubah.

Skenario terburuk dari sistem "ini" adalah tidak adanya ruang bagi kemiskinan itu sendiri, yang berarti tidak ada kesempatan bagi orang miskin untuk hidup. Namun, nantinya terdapat kemungkinan bahwa pemikiran kemiskinan bukan lagi tentang istilah moneter, yang hal ini pun sebenarnya merupakan gambaran yang kabur. Dengan demikian, altruisme terjebak dengan representasi kemiskinan dalam istilah moneter dan representasi ini hanya memungkinkan pemikiran tentang pemberantasan suatu jenis kemiskinan, bukan pemberantasan kemiskinan itu sendiri. Ironisnya, tindakan altruistik yang terbatas ini sebenarnya tidak lain melainkan hanya menyokong kemiskinan itu sendiri, yang dapat lebih jauh diterjemahkan menjadi "pemaknaan hidup pada akhirnya membutuhkan korban."

Apa Makna Derma?

Ajaran-ajaran di dunia secara umum memaknai sedekah sebagai tindakan luhur. Pengejawantahan makna menjadi awal dari perbedaan tata laksana, pandangan, dan nilai pada ajaran-ajaran tersebut. Narasi tentang kepastian balasan, lipat ganda, amal sebagai pengubah nasib, amal sebagai jalan keluar penderitaan, dan sebagainya dipahami sebagai cara ajaran menyampaikan gagasan luhur tersebut kepada manusia. Proses pemaknaan manusia atas sedekah juga dibuat terperinci dan disesuaikan dengan pandangan kelompok atas ajaran masing-masing. Kuantifikasi amal menjadi salah satu ide dari hasil pemikiran manusia atas sedekahnya, yang disebabkan adanya kebutuhan manusia untuk memberikan alasan atau tujuan kepada dirinya atas segala tindakan.

Menarik kembali cerita pada awal bagian tulisan, yaitu ketika seorang terpandang muslim memastikan karunia Tuhan kepada jamaahnya. Firman tentang surga yang 'tak dapat dikira dan penuh perjuangan (Q.S. Ali 'Imran: 142) tampaknya perlu kembali direnungkan bersama-sama. Kuantifikasi atau mengira-ngira amal yang dilakukan terlampau jauh sangat berpotensi melampaui Tuhan sebagai Maha Luas karuniaNya; kasih sayang-Nya, dsb. Selain itu, usaha menghitung amalan yang berlebihan pun dapat melalaikan kita dari berbagai hal penting, seperti meningkatkan amalan itu sendiri.

Kesimpulan

Sedekah merupakan salah satu aktivitas yang dimotivasi baik sosial maupun transendental. Dampak dari dua motivasi tersebut sangat kuat sehingga sering kali dalam berbagai situasi pembenaran atas salah satunya dilakukan. Sebagian orang yakin bahwa sedekah merupakan hubungan langsung dengan Tuhan, sebagian lain yakin sedekah merupakan hubungan antarmanusia yang diakomodasi Tuhan, dan sebagian lain yakin sedekah merupakan hubungan antarmanusia semata.

Penyesuaian perintah sedekah dilakukan atas dasar ruang dan waktu. Prosesnya yang sering kali tidak mulus menjadi pemantik bagi umat manusia untuk selalu mengembangkan cara-cara terbaik dalam bersedekah. Satu yang pasti dalam bersedekah adalah adanya tujuan dan/atau balasan yang diharapkan. Hal tersebut sangat manusiawi mengingat manusia selalu membutuhkan tujuan atas segala tindakan di dunia. Mengerucut pada ranah transenden, sedekah pada akhirnya sangat sulit dimaknai dengan angka karena terlalu banyak variabel yang 'tak dapat dikira atau dikuantifikasi. Sejauh tindakan tersebut ditujukan "hanya" untuk membentuk motivasi, tidak masalah. Namun, banyak hal yang nantinya terabaikan yang sebenarnya lebih penting dalam kaitannya dengan sedekah, seperti meningkatkan kualitas sedekah itu sendiri. Terlalu banyak perkiraan dan pengabaian membuat kebergantungan terhadap kuantifikasi amal sedekah sia-sia. ■

THE BUSINESS CYCLE, HEALTH BEHAVIOR, AND CHRONIC DISEASE: A STUDY OVER THREE DECADES

Divisi Penelitian

FOTO: JOHNNY COHEN | UNSPLASH.COM

Menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari, dan hari berganti menjadi bulan. Seorang pemuda di sebuah kota metropolitan berbaring di kamarnya dari pagi sampai malam. Ia berbaring sambil meneguk sebotol anggur merah, meratapi nasibnya sebagai pengangguran. Meratapi nasibmu dengan minuman keras tidak akan mengubah nasibmu, hal tersebut hanya akan membuatmu semakin sakit dan terpuruk.

Penyakit kronis merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di Amerika Serikat sejak akhir abad kedua puluh. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, pilihan nutrisi yang buruk, konsumsi tembakau, dan penggunaan alkohol yang berlebihan. Namun, terdapat beberapa faktor eksternal lain yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan penyakit kronis. Faktor eksternal ini ditemukan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu kondisi perekonomian. Pertama, penelitian Ruhm (2000) dan Xu (2013) menemukan bahwa siklus bisnis dapat secara signifikan mempengaruhi individu untuk lebih banyak merokok, kurang melakukan aktivitas fisik, dan melakukan diet tidak sehat selama peningkatan ekonomi . Kedua, penelitian Gerdtham dan Ruhm (2006), serta Ruhm (2000) menemukan bahwa pengangguran selama resesi menciptakan lebih banyak waktu untuk manusia melakukan kegiatan yang sehat.

Namun, Colombo (2018) menyebutkan bahwa hal ini mungkin bukan fenomena universal. Misalnya, selama resesi, pengangguran mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan, sementara orang yang bekerja dapat mencurahkan waktu tambahan untuk bekerja guna menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan populasi umum dan kurang menekankan pada ras dan gender. Oleh karena itu, Giri dan Kumaresan (2021) melakukan penelitian terbaru dengan tujuan menyelidiki dampak dari kontraksi makroekonomi pada hasil kesehatan individu dengan melihat penyakit kronis yang diderita oleh individu tersebut. Penelitian ini menggunakan diagnosis medis responden survei tentang penyakit kronis, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan gagal jantung kongestif (CHF), serta dilakukan analisis mengenai faktor pendapatan, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik .

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yang dimulai dengan mengetahui apakah kemerosotan ekonomi (*economic downturn*) memiliki dampak yang serupa dengan penyebab spesifik angka kesakitan (morbiditas). Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan mencari tahu apakah dampak kemerosotan ekonomi secara makro bervariasi antar ras dan gender. Terakhir, peneliti memeriksa mekanisme berupa aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan pendapatan rumah tangga yang mempengaruhi tingkat pengangguran agregat pada kesehatan.

Pengangguran Agregat dan Hasil Kesehatan

Berdasarkan hasil regresi dengan data yang digunakan, didapatkan bahwa baik tingkat pengangguran skala nasional maupun regional memiliki hubungan positif dengan tiga penyakit kronis yaitu diabetes, hipertensi, dan gagal jantung kongestif. Hal ini mengimplikasikan bahwa kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% turut menaikkan kemungkinan diabetes, hipertensi, dan gagal jantung sebesar 0.17, 0.21, dan 0.04 persen. Namun, hasil regresi menunjukkan adanya hubungan *countercyclical* yang signifikan antara tingkat pengangguran regional dengan obesitas dimana kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% akan menurunkan kemungkinan obesitas sebesar 0.22 persen. Hasil regresi tersebut turut mengimplikasikan bahwa kemerosotan ekonomi yang digambarkan melalui kenaikan tingkat pengangguran memiliki efek yang berbeda antara satu penyakit kronis dengan yang lainnya. Hasil perhitungan regresi pada tingkat pengangguran nasional juga memiliki hubungan serupa dengan tingkat pengangguran regional yang berarti level agregasi (per regional) tidak berpengaruh terhadap hubungan antara kondisi ekonomi dan kesehatan. Tingkat pengangguran nasional memiliki hubungan signifikan dengan penyakit kronis obesitas, diabetes, hipertensi, dan gagal jantung yang dibuktikan dengan nilai p lebih kecil dari 0.006 (**$p < 0.006$).

Perlu diketahui bahwa seluruh estimasi tersebut sudah termasuk kontrol variabel tambahan yakni tren waktu nasional, tren waktu regional, *individual fixed effect*, dan *regional fixed effect.* Hasil penelitian ini telah sesuai dengan literatur tentang penyebab khusus morbiditas dan kematian selama kemerosotan ekonomi, seperti salah satunya adalah kemerosotan ekonomi menyebabkan *job stress* yang dapat meningkatkan penyakit kardiovaskular (Belkic et al., 2004)

Perbedaan Ras dan Gender dalam Hasil Kesehatan

Sebelum menentukan hubungan antara ras dengan penyakit kronis, peneliti telah terlebih dahulu mencari tahu apakah kemerosotan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemungkinan penyakit kronis pada ras Hispanik, Hitam, dan ras lainnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ras Hitam memiliki tingkat kemungkinan penyakit kronis yang paling tinggi. Hal ini berhubungan dengan lingkup penelitian yaitu *non-White workers* yang dapat digolongkan sebagai tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah.

Kemudian, hasil regresi antara tingkat pengangguran dan kesehatan dalam kategori ras membuktikan bahwa tingkat pengangguran regional memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat obesitas yang dialami oleh ras Hitam. Sementara itu, tidak ditemukan adanya hubungan signifikan antara pengaruh tingkat pengangguran regional dengan obesitas pada ras Hispanik dan lainnya yang ditunjukkan dengan nilai p lebih dari 0.002 (**p < 0.02). Adapun pada aspek kesehatan yang lain seperti diabetes, hipertensi, dan gagal jantung memiliki hasil yang berbeda diantara ras. Ras Hitam dan lainnya memiliki hubungan signifikan antara tingkat pengangguran regional dan diabetes sedangkan hipertensi memiliki hubungan signifikan terhadap seluruh ras, serta gagal jantung yang hanya berpengaruh signifikan terhadap ras lainnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa ras Hitam memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami penurunan kesehatan selama kemerosotan ekonomi.

Sama dengan ras, gender pun telah terlebih dahulu dicari hubungan antara kemerosotan ekonomi dengan adanya penyakit kronis pada laki – laki dan wanita. Setelah mendapatkan hasil bahwa laki – laki dan perempuan memiliki respons kesehatan yang berbeda selama kemerosotan ekonomi, ditemukan bahwa tingkat pengangguran regional berpengaruh secara signifikan terhadap obesitas, diabetes, dan hipertensi yang dialami oleh wanita. Adapun tingkat pengangguran yang secara signifikan mempengaruhi penyakit kronis laki – laki hanya ada pada penyakit diabetes dan hipertensi dengan nilai p lebih kecil dari 0.03 (**p < 0.03).

Pendapatan dan Perilaku Sehat selama Kemerosotan Ekonomi

Pada tahap ini, peneliti beranggapan bahwa variabel pendapatan rumah tangga merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan tingkat konsumsi dan nutrisi. Gagasan ini didapatkan berdasarkan sebuah studi dari Ruhm (2000) yang menyatakan bahwa kemerosotan ekonomi dalam jangka pendek merubah *opportunity cost* dari waktu dan ketersediaan sumber daya ekonomi pada tingkat individu. Kedua indikator tersebut memiliki efek positif dan negatif pada kesehatan, sehingga hasil kesehatan secara menyeluruhnya dapat digunakan sebagai untuk keperluan penelitian ini.

Biaya peluang (*opportunity cost*) dari waktu luang seseorang ketika resesi menurun seiring dengan peningkatan tingkat pengangguran dan upah rendah. Ketika itu, beberapa orang dapat menghabiskan waktu melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kesehatan seperti berolahraga, atau mencari pekerjaan (jika mereka pengangguran) atau menghabiskan waktu untuk mempertahankan posisi mereka karena takut akan PHK. Maka dari itu, resesi berpotensi menimbulkan stres yang dapat mengakibatkan kebiasaan tidak sehat dan mengancam kesehatan.

Sedangkan resesi umumnya menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pemotongan upah yang secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga sehingga tingkat konsumsi rumah tangga pun ikut menurun. Sehubungan dengan fenomena ini, dapat pula diketahui bahwa orang dengan status ekonomi rendah memiliki pola makan yang kurang sehat. Sebaliknya, penelitian ini juga menyatakan bahwa kekurangan finansial turut mengurangi konsumsi barang tidak sehat seperti alkohol dan rokok. Kedua indikator tersebut dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan pendapatan dan waktu dapat meningkatkan atau mengurangi kesehatan selama fluktuasi jangka pendek tergantung pada perilaku individu.

Berdasarkan hasil olah data penelitian ini, terdapat hubungan negatif dan efek signifikan antara tingkat pengangguran regional terhadap pendapatan dimana kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% dapat mengurangi pendapatan sebesar 15.75%. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pendapatan rendah memungkinkan orang untuk lebih sedikit makan diluar dan mengurangi konsumsi yang mengurangi nutrisi. Gabungan dari pendapatan dan konsumsi alkohol yang rendah mengarah kepada penurunan obesitas, dan kenaikan dalam sektor diabetes. Penurunan dalam pendapatan individu dan rumah tangga akibat pengangguran dapat menyebabkan stress yang meningkatkan kemungkinan mengembangkan hipertensi dan gagal jantung.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kehilangan pendapatan selama kemerosotan ekonomi merupakan faktor kontributor utama dalam peningkatan penyebab spesifik morbiditas. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengangguran rendah menyebabkan berkurangnya nutrisi dan peningkatan stres akibat kondisi ekonomi. Adapun kombinasi antara pengurangan aktivitas fisik dan kehilangan pendapatan selama penurunan menyebabkan peningkatan diabetes, hipertensi, dan gagal jantung.

Kesimpulan

Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah siklus bisnis, khususnya kemerosotan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan peningkatan risiko penyakit kronis. Hasil penelitian yang berkaitan dengan kesehatan individu ini tentunya bergantung pada faktor genetika, pilihan gaya hidup, dan kondisi ekonomi.

‚Penelitian ini menemukan bahwa obesitas menurun selama krisis ekonomi, sedangkan kemungkinan diabetes, hipertensi, dan CHF meningkat. Ras Hitam dan wanita cenderung tidak mengalami obesitas selama resesi. Namun jika dibandingkan dengan kelompok lain, orang kulit hitam dan laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami kesehatan yang buruk. Efek ini terjadi akibat kurangnya peningkatan aktivitas fisik dan penurunan pendapatan selama resesi. Orang kulit hitam mengalami kerugian yang lebih besar dalam pendapatan daripada kelompok ras lain sehingga berdampak pada tingkat morbiditas yang lebih tinggi. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus mengidentifikasi individu rentan yang berisiko kehilangan pendapatan selama kemerosotan ekonomi. ■

Pengemudi ojek online *menyusuri jalan di Depok, Jawa Barat. Pengemudi ojek* online *merupakan salah satu contoh dari pekerja gig, yang perannya banyak dirasakan dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat.*

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

FOTO: YUSTINUS TJIUWANDA | UNSPLASH.COM

MENYIBAK ILUSTRASI KESETARAAN DALAM MERITOKRASI

Abdul Karim, Ivan Bintang Pamungkas, Fajarani Dwi Nur Safitri

Andi terdiam setelah melihat kata maaf di laman pengumuman ujian masuk PTN, ini tahun ketiganya mendapatkan kata-kata tersebut, yang berarti perjuangannya belajar disela sela waktu istirahat kerjanya, berakhir sia-sia. Lain cerita dengan Fikri, yang berhasil mendapatkan kata selamat dari laman tersebut. Ia menghabiskan duabulan di bimbingan belajar yang difasilitasi orang tuanya sehingga tanpa kesulitan ia mampu menjawab soal ujian. Inilah contoh perwujudan sistem meritokrasi, sistem yang 'adil' tanpa memandang keturunan dan kelas sosial seseorang, di mana hasil penilaian murni dari hasil kemampuan dan usaha orang tersebut dalam mengerjakan ujian.

Secara terminologi, meritokrasi berasal dari bahasa Yunani. *Merit* berarti jasa atau keunggulan dan "Krasi" dari bahasa Yunani Kuno *kratos* yang berarti kekuatan. Gabungan kedua kata tersebut dapat dimaknai sebagai tatanan yang dipimpin oleh orang yang pantas. Pantas dalam meritokrasi berarti orang tersebut memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bisa mendapatkan suatu posisi. Dalam praktiknya, meritokrasi merupakan sistem sosial di mana seseorang dinilai berdasarkan kemampuan dan usahanya (*merit*) dan semua orang memulai dari titik yang sama, tanpa memandang latar belakang seperti kekayaan dan keturunan. Dalam sistem ini, orang yang memiliki kemampuan, talenta, dan bakat adalah orang yang paling dihargai, baik dalam politik, sosial, maupun ekonomi.

Sejarah Meritokrasi

Pada awalnya, status seseorang dinilai dari keturunan dan kelas sosial. Kelas sosial tidak bisa diubah karena didapatkan sejak lahir. Kalangan bawah akan cenderung tetap bertahan dibawah sampai akhir hayatnya, dan kalangan atas cenderung tetap bertahan di atas meskipun mereka tidak melakukan usaha apapun dan hanya hidup santai. Penerapan awal dari sistem meritokrasi dapat ditarik ke Tiongkok pada masa Dinasti Han. Pemerintah pada masa itu mulai mengangkat pekerja berdasarkan keunggulan dan kemampuan yang dimiliki yang dilakukan melalui tes yang ketat. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kualitas pekerja meningkat dibanding menggunakan sistem sebelumnya yang menilai seseorang berdasarkan kelas sosial dan keturunan.

Meritokrasi di masa modern dimulai di abad ke-20, di mana istilah meritokrasi sendiri akhirnya muncul. Namun, perubahan ini pun bukan merupakan perubahan yang datang dari langit. Terdapat banyak perubahan sosial, ekonomi, dan politik, hingga sampailah kita pada sistem yang membuat orang berusaha untuk bisa mendapatkan posisi, bukan lagi semata-mata karena keturunan.

Kelebihan dari Sistem Meritokrasi

Dibandingkan dengan sistem lain, seperti aristokrasi dan plutokrasi yang menata struktur sosial berdasarkan kekayaan, meritokrasi dinilai lebih adil. Meritokrasi menilai seseorang dari kemampuan, dengan begitu timbul persaingan yang sehat, dimana setiap orang berusaha untuk mendapatkan apa yang ia rasa pantas. Meritokrasi juga mendorong kompetisi, dan dengan kompetisi maka kompetensi standar masyarakat akan meningkat. Tidak adanya persaingan seperti pada sistem aristokrasi, membuat hampir tidak adanya peningkatan di masyarakat, karena jabatan tidak diisi orang yang paling berkualitas, tetapi diisi orang yang beruntung lahir di keluarga yang terpandang. Selain itu, meritokrasi juga mendorong efisiensi karena menghilangkan SDM yang tidak kompeten dari suatu posisi. Terakhir, meritokrasi juga menciptakan masyarakat yang menghargai kompetensi dan usaha, serta akan meningkatkan produktivitas, singkatnya Meritokrasi mendorong kemajuan sosial.

Reverse Truth

Sayangnya dalam penerapannya, meritokrasi tidak semulus yang diharapkan. Karena pertama 'merit' dalam *meritocracy* bersifat subjektif. Apa saja keunggulan dan kemampuan yang dihargai? Siapa yang berhak menentukan? Karena sifatnya yang subjektif, seharusnya tidak ada menang atau kalah dalam sistem ini. Meritokrasi berjanji untuk memberikan kesempatan atau lebih tepatnya pilihan bagi orang untuk menjadi unggul atau tidak unggul. Namun, terdapat masalah yaitu tidak semua orang bisa mendapat akses dan fasilitas yang sama untuk menjadi unggul. Tidak ada kesempatan yang setara seperti yang dijanjikan. Meritokrasi hanya berfokus menyeleksi SDM yang unggul, tanpa diimbangi dengan pembentukan dan pembangunan SDM. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan yaitu "SDM yang akan unggul"

dan “SDM yang unggul” meritokrasi akan memilih SDM yang unggul dan mengesampingkan SDM yang mungkin saja lebih unggul lagi di masa depan.

Selain itu, sistem meritokrasi yang ada juga tidak benar-benar memberikan landasan yang adil untuk semua orang, karena meritokrasi yang sekarang ada merupakan ‘perkawinan’ antara meritokrasi dengan plutokrasi. Tidak semua orang mendapatkan fasilitas yang sama. Misal, orang yang kaya pasti akan lebih ‘menginvestasikan’ anaknya dengan disekolahkan di sekolah terbaik, diberikan les privat, juga dilatih keterampilan lainnya lewat kursus dengan harapan mereka dapat meneruskan *privilege* berada di atas strata sosial, mirip dengan seorang aristokrat yang memilihkan anaknya pasangan dari sesama keluarga terpandang. Intinya, orang yang berasal dari kalangan atas cenderung akan mendapatkan fasilitas yang lebih, dan yang kurang mampu harus bersaing dengan orang-orang tersebut. Dalam politik, hal yang sama juga terjadi, dimana *privilege* seseorang sangat berpengaruh. Tak ada bedanya dengan aristokrasi, di mana anak dari figur politik cenderung akan sukses berkarir di dunia politik juga. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat peran besar *privilege,* seperti kekayaan dan status sosial, yang seharusnya dihapuskan dengan sistem meritokrasi ini.

Terlepas dari kurang sempurnanya sistem meritokrasi yang ada sekarang, memang tidak mungkin sistem ini bisa sempurna. Bahkan jika kita berhasil menerapkan sistem meritokrasi murni, di mana diterapkan aturan ketat yang membatasi seluruh *‘privilege’* seperti sistem pendidikan yang merata dan tidak ada sekolah unggulan, penerapan 100% *inheritance tax*, dan langkah lainnya yang dapat memastikan semua orang yang mendapatkan fasilitas yang sama, tetap saja keberhasilan tidak murni berasal dari usaha dan kemampuan. Ada juga faktor keberuntungan dan kesempatan yang tidak mungkin bisa dibagi merata. Selain itu, meritokrasi menyebabkan orang terdistorsi, di mana orang yang berada di puncak menganggap mereka berhasil murni karena usahanyadan yang dibawah menganggap mereka gagal karena kurang usaha. Sistem ini mengatakan bahwa mereka pantas untuk mendapatkannya, berbeda dengan sistem plutokrasi dan aristokrasi yang mengakui bahwasannya kita semua memulai dari titik yang berbeda. Meritokrasi memberikan ilusi keadilan dan perasaan bahwa kita bisa berhasil kalau saja lebih giat, lebih bertalenta, atau lebih fokus. Ini menimbulkan rasa kebencian kepada diri sendiri yang akan mengakibatkan munculnya rasa gagal, perasaan meragukan diri sendiri, dan percaya bahwa memang kita pantas untuk berada di bawah.

> *“Perlu ada sertifikat yang mengakui bahwa mereka diakui, itu sistem meritokrasi berbentuk non-akademik. Dan Indonesia perlu kayak gitu karena kalau* enggak, *bakal repot.”*

Lakukan Perubahan, Hadapi Meritokrasi

Apabila di dunia ini tidak ada perubahan sosial, maka sistem meritokrasi sangat tidak adil. Namun karena adanya mobilitas sosial, inovasi dan adaptasi menjadi bekal untuk bertahan dan ‘naik’ dalam perubahan sosial. Meritokrasi seharusnya tidak lagi fokus hanya pada apakah seseorang bisa naik ke atas, tetapi apakah orang ini mendapat kesempatan untuk bisa berinovasi.

Masalah utama dari meritokrasi adalah sistem ini terlihat adil, padahal tidak, maka kita bisa memulai dengan menyadarinya bersama-sama bahwa tidak ada sistem yang sepenuhnya adil kepada semua pihak. Namun faktanya, sistem meritokrasi sejauh ini adalah yang paling mendekati keadilan, karena masih terdapat mobilitas masyarakat dari bawah ke atas, dibandingkan dengan sistem sosial lainnya yang sulit untuk menjanjikan mobilitas bagi yang berusaha. Sehingga, sistem ini perlu disempurnakan kedepannya.

Pertama, harus diterapkan pemerataan yang sama bagi semua orang, dengan memperkuat institusi publik seperti penguatan pendidikan, kemudahan akses kesehatan, dan akses terhadap informasi publik. Dengan solusi tersebut, diharapkan semua orang akan memiliki bekal yang kurang lebih sama.

Selanjutnya, diperlukan peran dari pemerintah untuk menarik pajak dari orang-orang yang memiliki kekayaan lebih. Serta dengan memberdayakan peran *non governmental organization* yang turut bekerja untuk menjaga keseimbangan dari atas, bawah, dan pemerintah. NGO memastikan bahwa pemerintah mengendalikan yang di atas, mendukung yang dibawah, dan menjaga keseimbangan antara tiga unsur ini. Selanjutnya dengan mengadakan sistem dukungan dari pemerintah maupun NGO melalui pelatihan SDM yang merata. Pemerataan ini bisa memfasilitasi orang yang bertalenta atau berbakat untuk mencari informasiyang bisa semakin mempertajam keunggulan mereka secara mandiri.

Menurut Kevin Nobel, Dosen Sosiologi Universitas Indonesia, Kita perlu membenahi ‘merit’ dalam meritokrasi dengan cara membuat sistem yang lebih adil, misalnya dengan pengakuan gelar non akademik untuk petani atau *chef* yang berpengalaman, karena tidak semua kemampuan bisa dinilai secara akademik.

Menurut Kanti Pratiwi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Solusi jangka panjang yang perlu diambil adalah meningkatkan *public funding*. Kita bisa menyekolahkan semua anak Indonesia dengan layak dan setara serta akses yang sama terhadap kesehatan dan gizi. Untuk solusi jangka pendek, bisa dengan menyediakan beasiswa bagi yang kurang mampu. Tetapi, solusi jangka pendek ini bukan sesuatu yang revolusioner dan hanya cenderung sebagai obat sakit kepala yang hanya mengobati sementara tanpa mengubah struktur fundamental dari sosial ekonomi kita yang timpang. Solusi jangka pendek lainnya bisa juga dengan *‘taxing the ultra-rich’* dan juga menutup *tax haven*. *Tax haven* ini merupakan korupsi yang menjadi sorotan publik global karena itu memiliki efek yang sangat signifikan.

Penutup

Memang sistem meritokrasi berhasil mendorong dan ‘memaksa’ orang untuk berusaha meraih posisinya. Tidak lagi dengan sistem turun menurun, namun akhirnya tetap ‘yang di atas’ dari lahir, akan berakhir di atas, dan yang lahir di bawah, lebih mungkin berakhir di bawah. Tidak mungkin ada keadilan menyamakan garis start semua orang. Maka dari itu, diperlukan upaya pemerataan agar semua orang memiliki kesempatan dan akses yang sama. Kita harus mengakui bahwa sistem ini tidaklah adil dan sempurna dan bahwa merit bukan hanya usaha dan kemampuan, tetapi juga ada faktor *investment, opportunity,* dan *luck* di dalamnya. ■

Kevin Nobell
Dosen
Universitas Indonesia

Kanti Pertiwi
Dosen
Universitas Indonesiai

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

PERJALANAN AURORA MARSYE: MENDORONG AKSESIBILITAS PEKERJA BLUE COLLAR DAN PERAN PEREMPUAN DI DUNIA KERJA

Shafira Taqiyya, Karen Theona Paramitha, Adisty Eka Zhafirah

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Hari ini, banyak tukang bangunan memenuhi rumahku untuk merenovasi rumah. Mereka bekerja dengan tenaganya sendiri, berhadapan dengan berbagai macam bahaya tanpa memiliki jaminan perlindungan kerja yang formal. Pekerja kerah biru, begitulah mereka kerap menyebutnya sebagai pekerja yang menggunakan tenaga manual dalam pekerjaannya. Dalam ketenagakerjaan Indonesia, pekerja kerah biru masih kerap luput dari perhatian.

Menyadari bahwa pekerja kerah biru memiliki talenta dan potensi yang dapat digali, Aurora Marsye kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Ia pun membangun sebuah layanan job platform bersama dua rekannya untuk membantu pekerja kerah biru, yang kini dikenal sebagai Lumina.

Awal Perjalanan Lumina

Aurora memiliki latar belakang dari ranah teknologi. Ia sempat menghabiskan waktu bertahun-tahun di sebuah perusahaan tech global. Selama bekerja di perusahaan tersebut, ia menyadari kurangnya representasi tenaga kerja Indonesia di kancah global. “Indonesia penduduknya terbanyak ke-4 di dunia. Logikanya, orang-orang Indonesia juga mempunyai talenta yang bisa bersaing di dunia internasional,” ujar Aurora. Aurora kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di Indonesia, Aurora melakukan eksperimen untuk membantu melakukan review CV kepada pencari kerja. Ternyata, hal tersebut cukup menantang dan sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya, Aurora menutup jasa review CV tersebut dan mulai mencari ide baru untuk membantu orang-orang mencari kerja.

Aurora kemudian bertemu dengan Aswin dan Irfan. Ketiganya membawa pemikiran dari sisi yang berbeda, yaitu Aswin dari sisi bisnis, Irfan dari sisi sosial, dan Aurora dari sisi ketenagakerjaan. Pemikiran mereka digabungkan menjadi satu yang melahirkan Lumina. Lumina adalah sebuah platform inklusif yang mempertemukan perusahaan dan pekerja, terutama pekerja kerah biru.

Rintangan dalam Perjalanan dan Harapan Terhadap Lumina

Saat ini, Lumina telah berhasil memiliki satu juta pengguna dan terkoneksi dengan 10.000 perusahaan. Dalam perjalanan Lumina yang memasuki enam bulan pada Oktober 2022 lalu, perkembangan Lumina dapat dikatakan cukup pesat. Di balik prestasi Lumina tersebut, tentunya tidak terlepas dari rintangan yang menghadang. Selama mengembangkan Lumina, Aurora mengalami berbagai rintangan, salah satunya adalah mengelola tim kecil yang ia rasa lebih menantang dibanding mengelola tim yang lebih besar. Aurora harus dengan cepat beradaptasi dengan berbagai bidang, dari yang sebelumnya terbiasa memegang bidang product, saat ini harus belajar dan memegang pula bidang lain seperti marketing dan business development. Namun, Aurora tidak menjadikan rintangan tersebut sebagai hambatan, tetapi sebagai sarana bagi dirinya untuk belajar lebih banyak dan berkembang di luar zona nyamannya. “It’s always better to stretch yourself a little bit karena ada tantangan,” ucapnya.

Pada masanya, Aurora pernah menjadi recruiter dan merasa bahwa prosesnya rumit dan panjang sampai akhirnya menemukan pekerja yang sesuai. Ia berharap bahwa Lumina dapat mempermudah perusahaan dan meringkas proses dalam merekrut pekerja baru. Untuk para kandidat, Aurora ingin Lumina dapat mendampingi orang-orang yang ingin maju, juga menyadarkan mereka bahwa ada banyak kesempatan untuk bekerja dan berkembang yang lebih baik di luar sana. Dengan itu, ia berharap Lumina dapat berperan dalam mengembangkan talenta pekerja, khususnya pekerja kerah biru. “We hope to be the light: itulah filosofi lambang Lumina itu sendiri. We want to show that there is a light at the end and there is still hope,” ujar Aurora.

> “Be aware that you have potentials *dan potensinya itu tidak dibatasi oleh apa yang Anda ketahui saja.*”

Role Model Perempuan di Dunia Kerja

Permasalahan lain dalam ketenagakerjaan Indonesia yang Aurora rasakan adalah kurangnya role model perempuan. Saat kembali bekerja di Indonesia, Aurora menyadari bahwa masih terdapat dunia kerja di Indonesia didominasi laki-laki. Tidak banyak perempuan yang mengisi posisi eksekutif perusahaan. Hal ini menjadi dorongan bagi Aurora untuk mengambil langkah yang lebih besar, yaitu menjadi pemimpin di Lumina dan tempat ia bekerja sebelumnya. Ia merasa bahwa bahwa perempuan harus ada yang menjadi contoh agar banyak yang ingin mencoba. “Perjalanan yang aku lewati ini aku harap, secara tidak langsung, bisa menjadi contoh kepada perempuan lain that female can also lead,” kata Aurora.

Pesan untuk Pekerja Blue Collar

Aurora melihat bahwa pekerja blue collar seringkali tidak percaya diri untuk mencoba ketika ada kesempatan bekerja. Mereka menjadi tidak percaya diri ketika disandingkan dengan orang yang memiliki riwayat jenjang pendidikan lebih tinggi, serta tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Aurora sangat mendorong para pekerja blue collar untuk meningkatkan wawasan, yaitu wawasan untuk menyadari bahwa ada kesempatan yang menanti di depan mereka dan kepercayaan diri untuk mencoba hal baru. “Be aware that you have potentials dan potensinya itu tidak dibatasi oleh apa yang Anda ketahui saja,” ucapnya. ■

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Aurora Marsye
Co-founder & CPO
Lumina

FOTO: BIMO WICAKSONO | KIBRISPDR

PENCAK SILAT: SENI BELA DIRI YANG MENDUNIA

Rania Fairuz Davianti, Daffa Dzakwan, Felicia Kinanti

Indonesia, negara dengan jutaan kebudayaan dan cerita. Pada setiap sudutnya, kita dapat menemukan suku, bahasa, serta adat-istiadat yang beragam. Di tanah inilah, lahir sebuah seni bela diri bernama pencak silat yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Akan tetapi, bagaimana eksistensi seni bela diri tersebut sampai saat ini?

Pencak silat merupakan salah satu seni bela diri asal Nusantara yang cukup terkenal. Tak hanya penduduk Indonesia, olahraga ini pun turut diminati oleh negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Dengan mengantongi gelarnya sebagai warisan budaya, pencak silat juga berhasil dipertandingkan dalam perhelatan olahraga terbesar di Asia. Pencapaian gemilang ini tentu bukan tanpa sepak terjang, mulai dari proses prakarsanya di zaman dahulu kala hingga bagaimana perpaduan kesenian dan olahraga ini dihormati oleh Indonesia.

Kelahiran Pencak Silat Sebagai Seni Bela Diri di Indonesia

Kemunculan pencak silat tidak jauh dari fungsi utamanya sebagai ilmu bela diri, yaitu adanya urgensi bagi manusia untuk berburu, bertahan hidup dan menyelamatkan diri dari serangan binatang buas. Pencak silat diyakini telah berada sejak masa prasejarah, tepatnya sekitar 6000 SM–1 M. Berdasarkan sebuah kajian yang dilakukan oleh Prof. Agus Aris Munandar, ahli arkeologi Hindu-Buddha di Indonesia, gerak bela diri ini dibawa oleh orang Austronesia yang berlayar sepanjang Filipina hingga Madagaskar. Pelayaran tersebut kemudian meninggalkan beberapa temuan arkeologi yang menggambarkan seni bela diri, seperti arca seseorang yang membawa pedang, menggunakan topi perang, dan orang yang berkelahi dengan ular.

Seiring dengan kelahiran kerajaan-kerajaan yang memiliki angkatan perang untuk mempertahankan maupun mengekspansi wilayah, pencak silat kemudian mengalami perkembangan ketika kedatangan bangsa India dan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam prasasti Sriwijaya, melalui seni bela diri, Raja Sriwijaya berhasil menaklukkan

berbagai daerah. Sementara itu, di wilayah nusantara lainnya, Kerajaan Tarumanegara berhasil mengalahkan musuh dan secara tersirat menunjukkan perkembangan adanya bela diri. Pada peradaban ini, peperangan, perkelahian, dan aktivitas memanah juga digambarkan melalui relief Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Saat ini, gerakan seni pencak silat Indonesia semakin diperkaya dengan adanya pengaruh dari budaya Tionghoa. Gerakan pencak silat Betawi, misalnya, telah berakulturasi dengan budaya kungfu Tiongkok. Akulturasi ini tercermin dari beberapa gerakan, simbol, dan bentuk hormat yang memiliki kemiripan.

Proses Pencatatan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Indonesia

Edwin mengungkapkan, terdapat persaingan antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal mengakui asal usul pencak silat. Dari segi pencatatan sejarah dan perkembangan aliran pencak silat, Malaysia memiliki arsip yang lebih lengkap. Untuk memperjuangkan pengakuan dari UNESCO tersebut, Indonesia harus melewati tiga proses tahapan: pengumpulan data dan pengajuan data, penyelenggaraan berbagai *workshop,* serta penyusunan dan negosiasi dokumen nominasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Indonesia melakukan kunjungan ke Museum Leiden di Belanda untuk melengkapi catatan sejarah pencak silat.

Berdasarkan keputusan, terhitung sejak tahun 2019, tradisi seni bela diri ini diakui keberadaannya oleh UNESCO sebagai bagian dari budaya Indonesia. Indonesia berhasil membuktikan bahwa pencak silat memiliki seluruh elemen yang membentuk warisan budaya tak benda, yaitu tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual dan festival, kerajinan tradisional, pengetahuan dan praktik sosial, serta kearifan lokal. Selain itu, UNESCO juga mengakui bahwa tradisi pencak silat telah menjadi identitas sekaligus pemersatu bangsa Indonesia.

Perkembangan Pencak Silat Dari Waktu ke Waktu

Istilah pencak silat pertama kali digunakan pada tahun 1922 dan ditandai dengan berdirinya Perhimpunan Pencak Silat Indonesia (PPSI). Kemudian, berdiri Gabungan Pencak Silat Indonesia (GAPENSI) pada tahun 1947 yang berganti nama menjadi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) setahun berikutnya. Dengan masuknya pencak silat sebagai cabang olahraga prestasi PON VIII tahun 1973, maka IPSI berfokus dalam mengembangkan pencak silat sebagai olahraga ke seluruh Indonesia, sedangkan fungsinya sebagai produk budaya lebih dikembangkan oleh berbagai komunitas yang peduli terhadap pelestarian pencak silat tradisional.

Dalam rangka mengembangkan pencak silat secara masif, atas inisiatif Bapak Pencak Silat Dunia, Bpk. H. Eddie M Nalapraya, didirikan Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) pada tahun 1980 dan merupakan satu-satunya organisasi internasional Pencak Silat di dunia. Organisasi ini mendapat dukungan oleh Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kemudian, dikirimlah duta pencak silat ke berbagai negara untuk memperkenalkan seni bela diri ini sekaligus membentuk institusi pencak silat di sana.

Memasuki era tahun 2000-an, perkembangan pencak silat mengalami kemajuan pesat. Melalui kegiatan-kegiatan bertema pencak silat yang diselenggarakan oleh komunitas pencak silat, kesadaran masyarakat akan warisan budaya ini semakin meningkat. Edwin menuturkan, film layar lebar, seperti Merantau, The Raid, dan John Wick yang menampilkan adegan gerakan pencak silat juga turut andil dalam mempengaruhi popularitas seni bela diri tersebut. Pada era ini pula, terdapat pembakuan standar dan peraturan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan dari pihak tertentu, khususnya untuk menghindari bias pada pertandingan internasional.

Berkat upaya-upaya yang dilakukan Indonesia tersebut, pencak silat semakin mendapat perhatian, baik dari masyarakat dalam negeri maupun mancanegara. Saat ini, terdapat 69 negara di seluruh dunia yang tergabung dalam anggota PERSILAT. Seni bela diri ini juga berhasil dipertandingkan dalam ajang olahraga *multi-event* internasional, seperti SEA Games dan ASIAN Games. "Target berikutnya adalah pencak silat mampu dipertandingkan dalam ajang olimpiade," tutur Edwin dalam wawancara.

> *"Target berikutnya adalah pencak silat mampu dipertandingkan dalam ajang olimpiade."*

Pencak Silat di Indonesia: Apa Tantangan Berikutnya?

Menurut Edwin, patut diakui bahwa masih banyak jalan yang harus dilalui untuk menyadarkan masyarakat secara utuh akan manfaat belajar pencak silat. Saat ini, kebanyakan masih menganggap pencak silat hanya sebagai sarana bela diri atau berprestasi di gelanggang. Sejatinya, pencak silat memiliki arti yang lebih dari kedua hal tersebut, yaitu sarana pembentukan karakter. Pada bela diri ini, terdapat nilai persahabatan, sikap saling menghormati, serta solidaritas. Oleh karena itu, sudah seharusnya baik perguruan pencak silat maupun pemerintah mulai menyusun metode pembelajaran yang sistematis dan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah.

Berbeda dengan Edwin, Arief berpendapat bahwa tantangan tertinggi dari pencak silat adalah perbedaan bentuk pembinaan dari setiap negara yang dapat berpengaruh terhadap tolok ukur dari kesuksesan atlet. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi proses pembinaan atlet pencak silat.

Terakhir, untuk menutup wawancara, Edwin berharap agar Indonesia dapat menjadikan pencak silat sebagai salah satu warisan budaya dunia dengan Indonesia sebagai tuan rumah serta sumber keilmuan dan pembinaan utamanya. Maka dari itu, jangan sampai pencak silat kehilangan eksistensinya baik dalam kancah nasional maupun internasional agar tetap bisa dikembangkan dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya. ■

Prof. Dr. Agus Aris Munandar
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Edwin Hidayat Abdullah
Wakil Presiden Direktur PT Aviasi Pariwisata Indonesia

MENILIK KONTRIBUSI GIG ECONOMY PADA PEMULIHAN EKONOMI

Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia FEB UI (Kanopi FEB UI)

FOTO: OMPIA_ | UNSPLASH.COM

"Nak, kamu sudah melamar pekerjaan ke perusahaan mana saja?"

tanya seorang ibu yang khawatir dengan masa depan anaknya yang baru saja lulus kuliah dan memilih bekerja sebagai freelance software engineer. Bekerja sebagai seorang freelancer sering kali dianggap sebelah mata, khususnya di Indonesia. Pekerjaan dengan bentuk seperti ini dikenal sebagai gig economy, yang masih dianggap terlalu berisiko dibanding pekerjaan konvensional yang biasa dikenal sebagai pekerjaan nine-to-five."

Pandemi Covid-19 telah menuntut perubahan tren pekerja di seluruh dunia. Mulai dari peralihan lingkungan kerja dari luring menjadi daring sampai ancaman gelombang PHK yang sempat memuncak pada kuartal-II tahun 2020 lalu. Belum lagi adanya fenomena *hiring freeze* yang dilakukan beberapa perusahaan telah menghambat jalan para lulusan baru dalam memasuki dunia kerja. Di balik peliknya keadaan, pandemi Covid-19 ternyata berperan sebagai katalisator dalam memperkenalkan sistem *gig economy* pada masyarakat.

W*orking for The Knife*: Bekerja Secara "Bebas"

Pekerjaan *gig* diartikan sebagai pekerjaan untuk proyek sementara dan dibayar berdasarkan jumlah barang atau layanan yang dikerjakan, bukan berdasarkan waktu kerja. Sifat yang tidak mengikat dan dibayar berdasarkan tugas ini mencakup lanskap *gig economy*. Tidak sedikit yang berpikir bahwa model kerja seperti ini tidak stabil. Meskipun begitu, kenaikan demografi pekerja lepas dan pekerja paruh waktu positif sebesar 1,03 persen atau naik sebanyak 2,03 juta orang dibandingkan Agustus 2020 memberikan perspektif lain (BPS, 2021). Perkembangan internet sebagai mediator dan ladang berburu pekerjaan menjadi salah satu katalis pada meningkatnya kontributor di *gig economy*.

Naiknya tren *gig economy* telah membuka banyak kesempatan baru bagi jutaan orang, termasuk bagi mereka yang sempat kehilangan pekerjaan dari sektor formal. Sistem ini dianggap lebih menarik, terutama bagi demografi muda yang cenderung ingin mencapai *work-life balance*. Kecenderungan yang berkembang ini menunjukkan bahwa tenaga kerja saat ini lebih mementingkan fleksibilitas yang didapatkan sebagai *gig worker* ketimbang stabilitas yang didapatkan sebagai *full-time worker*.

Teori ekonomi neoklasik berasumsi bahwa tenaga kerja selalu ingin memaksimalkan utilitas. Ketika upah naik, tenaga kerja akan lebih produktif atau akan bekerja lebih lama. Fenomena ini bisa ditemukan juga pada pekerja *gig* yang cenderung bekerja lebih lama jika memiliki insentif target finansial yang harus dicapai secara *time-dependent* (Allon, 2018). Sebagai contoh, seorang pengemudi dari jasa transportasi *online (ride-hailing apps)* akan cenderung mencoba untuk mendapatkan lebih banyak penumpang di pagi hari dibandingkan di malam hari ketika target pendapatan harian mereka sudah tercapai. Menurut para advokat pekerja *gig*, insentif dalam bentuk ini bisa memberikan pekerja lebih banyak otonomi untuk mengatur waktu kerja mereka selama pandemi. Pekerja dapat menyesuaikan dinamika waktu kerja yang sudah banyak berubah karena pandemi.

Perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya menyadari nilai dari fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh para pekerja *gig*. Kontrak jangka panjang yang semakin jarang hadir dalam pangsa pekerjaan kontemporer menjadi suatu strategi perusahaan dalam "melindungi" diri mereka dari kekurangan karyawan selama masa permintaan tenaga kerja yang tinggi. Praktik seperti itu dipandang sebagai pengeluaran yang tidak perlu selama masa permintaan tenaga kerja rendah. Dengan menggabungkan pasar tenaga kerja yang memiliki resapan tenaga kerja rendah bersama dengan peningkatan penggunaan aplikasi dan platform *online*, berbagai bisnis beralih ke pekerja *gig* di beberapa sektor. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan mengorbankan karyawan tetap yang dipandang sebagai investasi mahal pada saat pengangguran tinggi.

Berdasarkan hasil survey KPMG pada tahun 2020, di antara 315 CEO di seluruh dunia, hampir 70% menyatakan telah melakukan *downsizing* kantor. Hal ini mengindikasikan bahwa bisnis saat ini membuka diri bagi lebih banyak fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, *gig economy* hadir sebagai solusi bagi perusahaan dan pekerja dengan menawarkan sumber daya yang siap pakai dan model kerja jarak jauh yang memberikan keleluasaan pada tangan pekerja lepas.

Gig Economy dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Global gig economy tahun ini diperkirakan akan bernilai setara dengan USD 350 miliar. Berdasarkan *global gig economy* 2018, sekitar 90% dari nilai tersebut berhasil didominasi oleh perusahaan berbasis teknologi terutama layanan transportasi seperti Uber dan platform *asset-sharing* seperti Airbnb.

Sebuah studi yang dijalankan pada tahun 2019 oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics terhadap 5.008 mitra Grab di Indonesia juga mendukung pernyataan tersebut. Mitra pengemudi GrabBike dan GrabCar, mitra pedagang GrabFood, dan mitra agen GrabKios — dengan bantuan *platform* Grab — menyumbang Rp 77,4 triliun (US$5,3 miliar) bagi perekonomian Indonesia pada 2019, naik 58,3 persen dari Rp 48,9 triliun pada 2018 (Post, n.d.). Kontribusi para mitra Grab tergolong cukup signifikan. Padahal, jumlah ini hanya memperhitungkan kontribusi riil dan belum termasuk *multiplier effect* lainnya dari pekerjaan dan bisnis mereka.

Keefektifan sistem *gig economy* dalam membangun perekonomian bangsa pada periode sebelumnya diharapkan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menghidupkan kembali krisis saat ini. Kondisi pandemi yang mempercepat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi, tentunya akan lebih memudahkan akses *freelancer* untuk bertemu dengan individu yang membutuhkan jasanya.

Penting untuk disadari bahwa *gig workers* tidak hanya mencakup para pengemudi ojek *online*, tetapi juga banyak pekerjaan lain, seperti desainer *web* serta *programmer* IT. Berbagai jenis pekerjaan dalam *gig economy* menandakan bahwa pekerja *gig* dapat berkontribusi dalam berbagai sektor perekonomian.Melalui berbagai data dan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukan bahwa *gig economy* yang didukung oleh *platform* digital yang memadai memiliki peran yang penting dalam mendukung pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, hal ini harus terus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal efektif agar roda perekonomian bisa kembali bergerak ke era normal baru. ■

Kanopi FEBUI
Unity in Development

FOTO: KANOPI FEB UI

Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

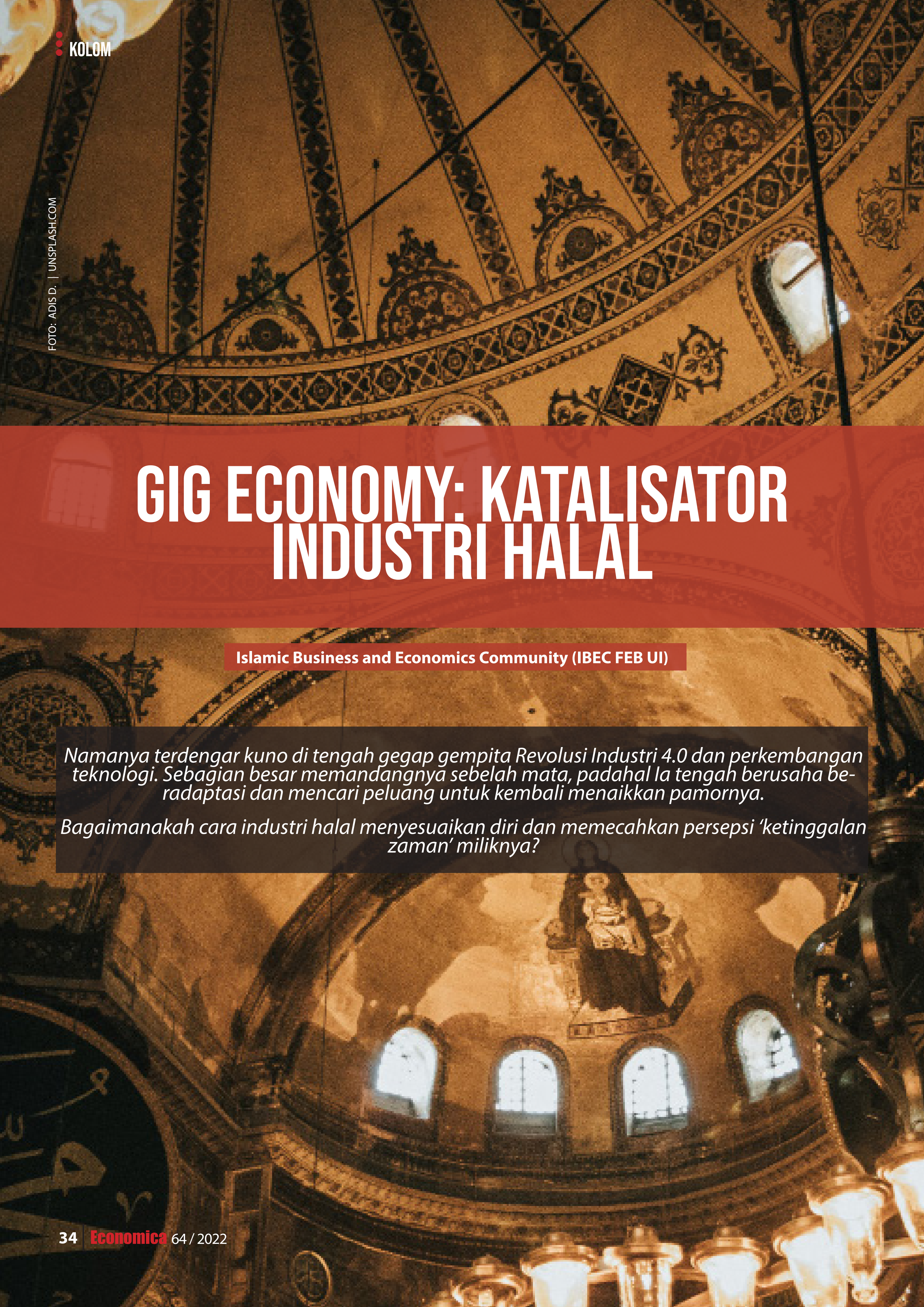

FOTO: ADIS D. | UNSPLASH.COM

GIG ECONOMY: KATALISATOR INDUSTRI HALAL

Islamic Business and Economics Community (IBEC FEB UI)

Namanya terdengar kuno di tengah gegap gempita Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi. Sebagian besar memandangnya sebelah mata, padahal Ia tengah berusaha beradaptasi dan mencari peluang untuk kembali menaikkan pamornya.

Bagaimanakah cara industri halal menyesuaikan diri dan memecahkan persepsi 'ketinggalan zaman' miliknya?

Beberapa waktu terakhir ini, kita cukup sering mendengar pembahasan mengenai *gig economy*, lantas apa yang dimaksud dengan fenomena ini? Kata "gig" sendiri biasa diasosiasikan dengan membayar seorang artis dengan kontrak kerja jangka pendek. Fenomena ini terjadi di masyarakat seiring merosotnya popularitas pekerja tetap pada suatu perusahaan dan digantikan dengan banyaknya para pekerja *freelance* yang bekerja sesuai proyek yang diberikan dari berbagai perusahaan. Karakteristik dari fenomena ini adalah seseorang mempunyai kebebasan untuk memilih (*free-will*) dalam memilih pekerjaan yang Ia inginkan. Menurut Burchell (2001), perkembangan teknologi dan digitalisasi, inovasi, dan komersialisasi sektor swasta akan semakin meningkatkan fenomena ini di masyarakat (dalam Basit dan Puspitarini, 2020).

Fenomena *gig economy* memperkenalkan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Konsep tersebut lalu meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi juga memicu masyarakat untuk semakin fleksibel dalam bekerja. Pekerjaan dengan kontrak pendek menjadi pilihan di era *gig economy* saat ini. Dengan keahlian profesional, pekerjaan dengan kontrak pendek menawarkan pekerjaan yang fleksibel serta penghasilan yang menjanjikan. *Video editor*, *driver* transportasi *online*, serta pemrograman perangkat lunak menjadi tiga dari sekian banyak pekerjaan kontrak pendek yang berpeluang besar menjadi bagian dari *gig economy*. Beberapa pekerjaan tersebut menawarkan kerja bebas yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Fenomena *gig economy* ini tidak dapat dipungkiri mampu menjadi sektor potensial dalam aspek perekonomian nasional. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Kawasan Industri Halal (KIH) sebagai salah satu aspek perekonomian halal di Indonesia membutuhkan potensi pekerja *gig economy* untuk mendukung dan mengupayakan pemenuhan tantangan dari masing-masing sektor di industri halal itu sendiri. Secara garis besar, beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Industri Halal (KIH) menurut KNEKS, sekaligus proyeksi pemenuhan kebutuhannya oleh fenomena *gig economy*, yaitu:

1. Kurangnya *database* industri halal

Pengintegrasian *database* dibutuhkan dalam rangka pengoptimalan industri halal. Hal ini berhubungan dengan rantai pemasok halal yang memastikan kehalalan produk halal hingga sampai ke tangan konsumen. Pemenuhan integrasi *database* ini diharapkan mampu menjadikan industri halal lebih inklusif, baik bagi produsen, distributor, maupun konsumen.

2. Kurangnya literasi digital mengenai industri halal dan keuangan halal

Peran *influencer* sebagai salah satu penggerak *gig economy* memegang pengaruh dalam hal memperkenalkan hingga menginternalisasikan gaya hidup halal bagi masyarakat. Hal ini mampu membawa pengaruh positif, baik bagi masyarakat maupun *branding* produk dan layanan halal itu sendiri.

3. Sumber daya manusia pada pariwisata halal

Posisi pariwisata Indonesia yang menuju global membuat Indonesia harus dapat memenuhi kebutuhan turis asing di domestik, salah satunya melalui penyesuaian bahasa. Peran *gig economy* pada pariwisata halal itu sendiri dapat menduduki peran seperti *translator, tour guide,* hingga UMKM lokal.

Namun, terlepas dari segala potensi cemerlang yang dapat kita jumpai dari fenomena *gig economy*, tidak dapat dielak bahwa fenomena ini tetap memiliki dampak negatif yang dapat dirasakan oleh para pekerjanya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pekerja dalam *gig economy* dapat dikatakan sebagai *short-term workers* ataupun *freelancer*. Lalu, bagaimana pengaruh dari dampak negatifnya? Dampak negatifnya terdapat di konsekuensi yang diterima oleh para pekerja *gig economy* tersebut. Pada umumnya, pekerja tetap dan pekerja lepas tentu memiliki aspek-aspek yang membedakan di antara keduanya, begitu pula yang terjadi di lingkungan kerja *gig economy*. Para *freelancer* dihadapkan pada konsekuensi bahwa mereka tidak dapat memperoleh jaminan dana pensiun, tunjangan hari raya, dan juga BPJS. Serta, para pekerja juga kerap dihadapkan pada *workload* yang berlebihan serta diikuti dengan target pencapaian perusahaan yang tinggi dan diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Pada akhirnya, keadaan ini dapat membawa kita kepada fenomena *hustle culture*.

Hustle culture adalah gaya hidup seseorang, atau kini telah dapat dikatakan sebagai 'budaya', di mana seseorang merasa harus memprioritaskan kerja keras dibandingkan istirahat. Sudah dapat dikatakan sebagai 'budaya' karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Finery Report (2021), sebanyak 83,6% responden menganggap kerja lembur adalah hal yang lumrah, diikuti dengan sebanyak 69,9% responden mengaku sering bekerja hingga akhir pekan, dan sebanyak 60,8 responden merasa bersalah jika tidak lembur. Data ini sejalan dengan keadaan pekerja *gig economy* yang kerap dituntut oleh produktivitas kerja yang tinggi. Di mana, jika budaya ini terus berlanjut, akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan para pekerja, baik kesehatan fisik maupun mental.

Sebagai penutup, Islam sangat mendorong umatnya untuk produktif dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari - hari baik itu sebagai pekerja tetap ataupun pekerja lepas. Hanya saja, untuk menyiasati dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari fenomena *gig economy* kali ini, ada baiknya untuk sedikit melihat bagaimana Islam memandang pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bagi para pemberi kerja, meskipun mempekerjakan orang diluar karyawan tetap, mereka harus tetap membayar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati serta jangan menunda-nunda pembayarannya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk membayar upah para pekerja sebelum keringatnya mengering. Kemudian, untuk para pekerja, jangan sampai dalam melakukan pekerjaan *freelance* untuk mendapat uang sebanyak mungkin sehingga terjebak dalam *hustle culture* yang melalaikan urusan lain terlebih perihal agama. Sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam Surat Al-Qashash ayat 77 yang memerintahkan kita untuk mencari pahala bagi kehidupan di akhirat, sembari mencari penghidupan yang baik di dunia.

Wallahu a'lam bishawab. ■

Islamic Business and Economics Community
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

FOTO : IBEC FEB UI

FOTO: Pavel Daniljuk | PEXELS.COM

CULTURAL AUDIT: IS IT THE SOLUTION FOR THE GIG?

Studi Profesionalisme Akuntan (SPA FEB UI)

Perkenalan dan wajah baru merupakan hal biasa bagi seorang pekerja lepas. Bak nomaden, Ia silih berganti hinggap dari satu tempat ke tempat lainnya. Beradaptasi. Esensial, tetapi sulit dilakukan bagi sang pekerja lepas, terutama dengan beragamnya budaya, lingkungan, dan manusia yang mereka temui. Mereka mengharapkan sapaan hangat dan juluran tangan yang dapat diandalkan dalam proses tersebut. Tentu saja, walau hanya sesaat, pekerja lepas itu menginginkan sebuah kenyamanan di tempat mereka mengadu nasib mengais pundi-pundi rupiah.

Pada awalnya, gig economy hanya terdapat dalam industri kreatif dan teknologi, tetapi saat ini sektor keuangan, akuntansi, dan kesehatan juga sudah memulai langkahnya menuju gig economy. Kemunculan gig economy membuat banyak perusahaan tertinggal dan masih mencoba beradaptasi untuk mengelola pekerja lepas bagi perusahaan dengan hanya mengontrak pekerja independen dalam jangka waktu pendek. Menurut data statistik, jumlah pekerja lepas di Amerika Serikat meningkat sebanyak 12% dari tahun 2014 hingga 2021 dan diperkirakan akan mencapai 1,2 miliar pada tahun 2028 atau 34% dari seluruh tenaga kerja di seluruh dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte, dinyatakan bahwa keberadaan pekerja lepas akan dapat menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh eksekutif perusahaan.

Tantangan ini muncul lantaran pekerja lepas cenderung lebih sulit menyerap budaya perusahaan. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu yang lebih singkat bagi pekerja lepas untuk menyerap budaya perusahaan dibandingkan pekerja tetap lainnya. pekerja lepas juga memiliki sikap tak acuh akan budaya perusahaan. Di sisi lain, budaya perusahaan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan jangka panjang sebuah brand. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Duke University's Fuqua School of Business, profit dan budaya perusahaan memiliki korelasi positif yang besar. Kegagalan pekerja lepas untuk menyerap budaya akan mengakibatkan penurunan performa bisnis, kurangnya kepercayaan, dan kepedulian. Oleh sebab itu, setiap perusahaan memerlukan audit budaya untuk mengetahui kondisi budaya perusahaan terhadap karyawannya.

Audit budaya memberikan penilaian gambaran tentang kesehatan budaya tempat kerja organisasi. Untuk melakukan audit budaya, perusahaan dapat membentuk tim internal yang terdiri dari karyawan lintas departemen. Dengan begitu, proses audit budaya dapat berjalan dengan efektif. Selain tim internal perusahaan, konsultan eksternal juga dapat melakukan audit budaya. Konsultan eksternal dapat berperan ketika budaya perusahaan menunjukkan kondisi yang tidak sehat. Hal ini bertujuan agar mendapatkan kepercayaan karyawan dan mendapatkan respons yang lebih terbuka. Menurut Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), terdapat delapan poin utama dalam mengaudit budaya, antara lain:

1. Perusahaan harus mengerti tentang audit budaya

Budaya adalah kunci terhadap strategi bisnis yang lebih baik dan mencapai keunggulan kompetitif yang lebih besar. Telah dibuktikan bahwa audit dapat diterapkan pada budaya yang dilakukan oleh auditor internal. Adanya independensi audit internal suatu perusahaan akan memberikan pandangan yang luas dan mendalam karena tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

2. Memperoleh dukungan dari dewan dan komite audit

Adanya dukungan dari dewan dan komite audit dapat berguna untuk mengatasi keraguan atas manfaat pengauditan budaya. Tim auditor perlu menjelaskan akan nilai audit internal dan fakta akan independensi audit internal yang dapat memberikan pandangan yang luas dan mendalam akan budaya, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

3. Menentukan cakupan audit

Tim auditor harus menentukan apa yang dibutuhkan, baik pengetahuan budaya perusahaan secara umum atau area dan aspek tertentu.

4. Menggunakan pendekatan berbasis risiko

Budaya meliputi seluruh aspek dari suatu organisasi, sehingga akan sulit untuk mengaudit seluruh aspek sekaligus. Fokus audit harus ditujukan pada area dengan risiko budaya bawaan yang lebih besar (contoh: komisi penjualan yang tinggi; lokasi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi; tenaga kerja sementara), atau area yang terekspos akan risiko budaya (contoh: skor keterlibatan yang buruk; pergantian pemimpin yang tinggi).

5. Menyusun strategi untuk mengelola sumber daya dan mempertimbangkan model sumber daya yang paling sesuai dengan audit perusahaan masing-masing.

Perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan strategi audit, dimulai dengan membangun tim spesialis yang mengikutsertakan spesialis dalam psikologi, SDM, dan struktur organisasi yang memiliki kompetensi untuk mengaudit budaya, nilai, dan program perubahan. Pendekatan ini diimplementasikan dalam tim berskala besar yang bertujuan agar mendapatkan kepercayaan karyawan dengan cepat. Selanjutnya, diperlukan pelatihan tim audit dan penerapan integrated audit yang melibatkan manajemen risiko dan kepatuhan, serta auditor eksternal.

6. Menyesuaikan pendekatan audit dengan kondisi organisasi.

Beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain:

- *Diskrit,* dengan melakukan audit yang ditargetkan seputar budaya yang memiliki risiko. Contohnya, unit bisnis tertentu, geografi, atau tujuan dari bisnis.
- *Komponen*, dengan memasukkan penilaian tujuan budaya ke dalam proses audit untuk memberikan cakupan yang lebih besar. Jika kesiapan organisasi untuk mengaudit budaya kurang berkembang, memperkenalkan wawasan budaya (misalnya dalam kaitannya dengan akar penyebab) dapat menjadi pendekatan yang logis dalam membangun pendekatan yang lebih akurat di tahun-tahun mendatang.
- *Konsolidasi*, yaitu dengan melakukan penelitian atas semua bukti audit, baik itu dari audit budaya, audit yang lebih luas atau kegiatan audit internal lainnya. Metode ini menghasilkan satu sudut pandang tentang budaya perusahaan dengan menggunakan teknik, seperti: kualitatif (wawancara, kelompok fokus, observasi perilaku), kuantitatif (KPI, data, survei), pemantauan terus menerus sepanjang tahun, dan analisis data, khususnya Artificial Intelligence / analisis sentimen.

7. Bersifat fleksibel dalam pendekatan

Sebagian besar fungsi audit internal yang telah menerapkan audit budaya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk sepenuhnya menetapkan pendekatan yang tepat dengan keterampilan yang tepat dan untuk membangun kredibilitas dalam bisnis.

8. Penyusunan laporan audit dengan memperhatikan berbagai komponen

Komponen tersebut antara lain:

- Area yang sudah berfungsi dengan baik
- Deskripsi budaya perusahaan dengan detail.
- Rekomendasi pendekatan audit budaya yang bervariasi.
- Nilai atau skor budaya untuk masing-masing pendekatan.
- Tindak lanjut yang dapat mendorong perubahan organisasi secara nyata.
- Rumusan kesimpulan yang mencakup hasil audit budaya perusahaan, resistensi selama proses audit berjalan, serta sikap manajemen dan hasil pengamatan audit.

Berkembangnya gig economy dan pekerja lepas yang makin meningkat merujuk pada audit budaya yang perlu dilakukan secara terus-menerus. Dengan dilakukannya audit budaya, perusahaan dapat mengetahui kondisi budayanya serta pengaruh dan tindak lanjut yang diperlukan terhadap karyawan dan perusahaannya.

Dengan demikian, perusahaan juga dapat menentukan langkah yang tepat untuk menciptakan budaya perusahaan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan bisnis perusahaan. ■

SPA feb-ui

Studi Profesionalisme Akuntan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY:

MENILIK POTENSINYA SEBAGAI FIAT CURRENCY MASA DEPAN

Management Student Society FEB UI (MSS FEB UI)

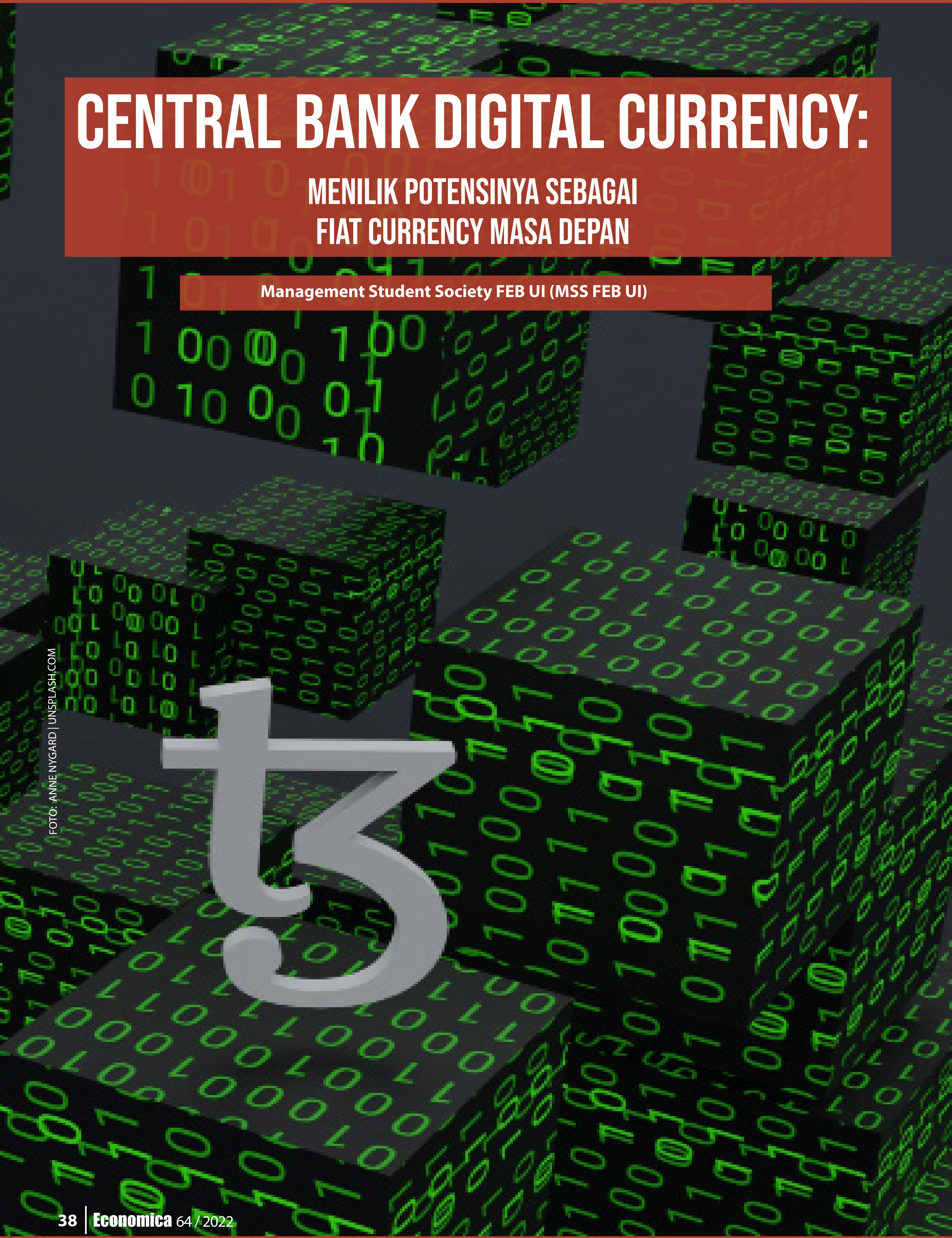

FOTO: ANNE NYGARD | UNSPLASH.COM

"CBDC (Central Bank Digital Currency) is one of the most important trends for the future of money and payments over the next decade."
- Cuy Sheffield, Head of Crypto at Visa

Sebagai respons terhadap munculnya mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, CBDC atau *Central Bank Digital Currency* menjadi suatu hal yang lebih didiskusikan oleh bank sentral di seluruh dunia. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan *digital currency* yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Kegunaan dan fungsinya identik dengan mata uang fiat tradisional, yang membedakan hanya bentuknya adalah digital. Bank sentral negara-negara tersebut mempertimbangkan untuk menerbitkan CBDC masing-masing untuk mengantisipasi bahaya dan ancaman yang timbul oleh mata uang digital tersebut . Salah satu kekhawatiran yang ada dengan munculnya mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum adalah mengenai *shadow bank*. *Shadow bank* merupakan institusi finansial yang beraktivitas layaknya sebuah bank, namun dan tidak diawasi oleh pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa masalah lainnya seperti kestabilan nilai mata uang, volatilitas, dan minimnya keamanan yang membuat bank sentral di beberapa negara mempertimbangkan untuk menerbitkan CBDCnya sendiri . Sehingga, kelebihan, kekurangan, potensi, dan *feasibility* penerapan CBDC di Indonesia menjadi topik kajian yang sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Potensi Serta Tantangan CBDC di Indonesia

Pada akhir tahun 2022, Indonesia mempertimbangkan untuk menerbitkan *Central Bank Digital Currency* melalui Bank Indonesia. CBDC cukup menarik bagi masyarakat terutama generasi muda karena CBDC mudah ditransfer melalui format *peer-to-peer* dan praktis yaitu dapat diprogram untuk semua kasus penggunaan. CBDC dapat memudahkan pihak *retailer* untuk bisa langsung mengunjungi ritel, sehingga biaya transaksi menjadi lebih rendah dan kecepatan transaksi lebih cepat; diterima secara global, terpercaya, dan bersifat inklusif; dapat digunakan sebagai uang tunai yang lebih stabil, termasuk uang elektronik; dapat digunakan untuk implementasi kebijakan fiskal dan moneter tertentu; dan pengawasan yang lebih besar, lebih mudah dilacak sebagai upaya mencegah kejahatan dalam sistem keuangan. Namun, CBDC juga memiliki beberapa kekurangan seperti fungsi intermediasi perbankan yang justru bisa berkurang karena biaya pendanaan yang bertambah serta adanya kemungkinan terjadi volatilitas dan *currency cold wars*. Untuk itu, penerbitan dan peredaran CBDC akan dikontrol oleh bank sentral.

Berkaca Terhadap Negara Lain

Sejak 2013, banyak bank sentral yang telah mempelajari CBDC, sebuah studi dari *Bank for International Settlement* (BIS) baru-baru ini mengungkapkan bahwa 70% survei yang dilakukan oleh bank sentral adalah tentang CBDC. Bahkan IMF mendorong bank sentral untuk mengeksplorasi CBDC dalam dokumen yang dirilis pada November 2017. Dalam konferensi *Official Monetary and Financial Institutions Forum* (OMFIF) pada Oktober 2019, Deputi Gubernur Pertama Bank Prancis juga mengatakan bahwa bank sentral tidak boleh menahan diri dari bereksperimen dengan berbagai bentuk CBDC. Beberapa proyek dari institusi di seluruh dunia telah dilakukan terkait CBDC. Misalnya di Singapura, "*Project Ubin*" mencari cara baru untuk melakukan pembayaran lintas batas menggunakan CBDC serta penggunaan DLT (*Distributed Ledger Technology*) untuk kliring dan penyelesaian pembayaran dan sekuritas. Selain itu, PBoc (Bank Rakyat China) juga memiliki rencana besar untuk merilis CBDC versi China, koin Pembayaran Elektronik Mata Uang Digital (DCEP). PBoC tidak bermaksud untuk secara langsung menerbitkan koin DCEP kepada masyarakat umum; sebaliknya, itu akan membiarkan sistem keuangan saat ini untuk melakukannya. Koin DCEP dimaksudkan untuk digunakan sebagai pengganti uang kertas saat ini. Untuk mentransfer, menerima, dan menyimpan koin DCEP, pengguna harus membuat dompet digital, yang dapat dilakukan secara independen dari rekening bank.

CDBC Menjadi Dasar Berkembangnya *Digital Currency*

Sebagai salah satu jenis *digital currency* yang dipercaya akan mengubah masa depan industri keuangan global, CBDC menjadi dasar dari berkembangnya konsep *digital currency*. Hal ini dapat memicu perubahan berbagai sistem transaksi dan perekonomian dunia dimana seiring berkembangnya teknologi di era digitalisasi saat ini, uang menjadi semakin tidak memiliki wujud fisik, dan terjadi perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi finansial memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, baik untuk kepentingan jual beli, transfer dana, atau membayar tagihan. Mulai dari penggunaan kartu debet atau kredit yang digesekkan ke mesin EDC (*Electronic Data Capture*) hingga penggunaan *e-wallet* seperti Go-Pay, OVO, Dana, dan ShopeePay, menjadi pilihan alternatif untuk bertransaksi finansial tanpa perlu membawa sejumlah besar nominal uang tunai saat berpergian. Dengan kemudahan tersebut maka akan semakin banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik dibandingkan uang kartal sebagai alat untuk transaksi pembayaran.

Pada tahun 2022, inisiatif uang digital akan terus berlanjut, menjadikannya tahun terpenting bagi pengembangan dan kemajuan CBDC di seluruh dunia. Ketika upaya untuk menerbitkan CBDC semakin cepat, bank sentral memiliki tugas untuk memastikan kesuksesan adopsi publik. Hal ini juga berlaku jika Indonesia ingin menerbitkan CBDC. Seperti mata uang digital, langkah-langkah dan strategi adopsi perlu disesuaikan untuk memenuhi persyaratan masing-masing negara serta harapan dan kekhawatiran konsumen dan bisnis di sana.

FOTO: MSS FEB UI

Management Student Society
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

STAGFLASI GLOBAL DAN IMPLIKASI TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Teuku Riefky

"Pandemi sudah lewat, berarti ekonomi Indonesia nanti balik lagi ke normal kan ya, Pak?"tanya seorang mahasiswa ekonomi kepada dosennya mengenai ekonomi Indonesia setelah pandemi. Sebagai warga Indonesia, tentunya kita berharap yang terbaik bagi negara kita setelah pandemi. Namun, harapan akan ekonomi yang normal setelah pandemi sepertinya tidak sepenuhnya terkabulkan. Karena seorang monster yang ditakuti seluruh ekonom dunia berpotensi untuk muncul setelah pandemi COVID-19, yaitu stagflasi, sebuah amalgamasi dari inflasi dan resesi.

FOTO: NICHOLAS CAPPELLO | UNSPLASH.COM

Pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 sudah dimulai sejak pertengahan 2021, terutama di berbagai negara maju. Dampak dari kombinasi pengucuran stimulus fiskal secara masif, ditambah dengan mulai terkendalinya angka kasus Covid-19 harian, dan kembali munculnya lapangan pekerjaan menimbulkan peningkatan permintaan agregat secara besar-besaran. Pulihnya permintaan dan daya beli masyarakat, khususnya di negara maju, pada saat itu kurang mampu diimbangi dengan pulihnya aktivitas produksi dan kemampuan sisi suplai sehingga menimbulkan *excess demand* atau *shortage*, suatu kondisi dimana permintaan melebihi suplai. Ketika permintaan melebihi suplai, harga barang pun meningkat,dan hal ini dapat menjadi pendorong munculnya tekanan inflasi. Rantai pasok global yang masih terdisrupsi akibat tingginya kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia lain, juga berkontribusi terhadap momentum peningkatan inflasi sejak semester kedua 2021, diikuti dengan naiknya harga energi, bahan baku, dan upah tenaga kerja.

Perang Rusia-Ukraina Penyulut Krisi Energi dan Pangan Global

Naiknya momentum inflasi kemudian diperparah di awal tahun 2022 dengan pecahnya perang Rusia-Ukraina yang ber-

dampak terhadap peningkatan harga energi dan pangan global. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan produsen utama kedua komoditas tersebut. Rusia sebagai salah satu produsen utama minyak dan gas dan Ukraina sebagai produsen gandum utama menyebabkan suplai beberapa komoditas tersebut terhambat secara signifikan. Implikasinya, permintaan terhadap produk substitusi energi dan pangan juga meningkat yang menyebabkan loncatan harga pada produk energi dan pangan secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada semakin parahnya inflasi di berbagai penjuru dunia dari sisi ekonomi serta ancaman terhadap daya beli masyarakat yang menimbulkan risiko perlambatan aktivitas ekonomi atau bahkan resesi.

Kombinasi antara inflasi yang meningkat dan perlambatan aktivitas ekonomi dikenal dalam istilah ekonomi sebagai stagflasi. Secara historis, stagflasi merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi perekonomian. Stagflasi biasanya mengarah pada munculnya tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan, dan lonjakan kemiskinan. Parahnya, ancaman stagflasi bermunculan di berbagai penjuru dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Di AS misalnya, tingkat inflasi sudah mencapai angka 9,1% dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif atau berkontraksi dalam dua triwulan secara berturut-turut. Merespon terhadap tekanan inflasi yang cukup signifikan, berbagai bank sentral di seluruh dunia mengambil langkah kebijakan moneter yang cukup agresif. Selama tahun 2022, bank sentral AS atau the Fed telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 2,5%, Inggris sebesar 1,5%, dan Uni Eropa sebesar 0,5%. Langkah ini juga diikuti oleh berbagai bank sentral negara berkembang seperti Brazil yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 4%, Meksiko sebesar 2,25%, dan India sebesar 1,4% selama tahun 2022. Kebijakan moneter yang agresif ini diambil dalam rangka meredam laju inflasi. Namun, di sisi lain, kebijakan moneter yang agresif juga memicu penurunan aktivitas ekonomi. Sejauh ini, masih belum terlalu jelas apakah langkah pengetatan ini akan menghasilkan dampak yang diinginkan, yaitu meredam laju inflasi, atau justru menimbulkan dampak yang berlebihan dengan memicu terjadinya resesi.

Nasib Indonesia

Indonesia memasuki tahun 2022 dengan kondisi yang jauh lebih baik dari kebanyakan negara maju dan berkembang. Walaupun angka inflasi umum per Juli 2022 tercatat mencapai 4,94% secara tahunan, yaitu lebih tinggi dari target inflasi BI sebesar 2%-4%, angka inflasi Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara *peers*, bahkan jauh lebih rendah ketimbang level inflasi yang dihadapi oleh kebanyakan negara maju. Beberapa hal berkontribusi terhadap angka inflasi Indonesia yang relatif terkendali sejauh ini. Dari sisi momentum pemulihan ekonomi, Indonesia baru pulih dari pandemi Covid-19 di awal tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di level pra-pandemi dengan kisaran 5% selama dua triwulan awal 2022, di saat negara lain telah mengalami pemulihan ekonomi yang konsisten sejak pertengahan tahun 2021 sehingga Indonesia relatif *behind-the-curve* dari segi waktu pemulihan ekonomi. Kondisi ini terlihat dari angka inflasi negara lain yang sudah mulai merangkak naik sejak tahun lalu sedangkan Indonesia baru melihat pola ini sejak pertengahan 2022. Faktor lain yang juga berkontribusi adalah tekanan harga komoditas global yang mampu diredam oleh postur fiskal Indonesia. Sebagai net eksportir komoditas utama energi, seperti batubara dan minyak sawit, membuat Indonesia mengalami peningkatan penerimaan negara dari tingginya harga komoditas global membuat ruang fiskal Indonesia melebar di tengah ketidakpastian global saat ini, sedangkan berbagai negara mengalami penyempitan ruang fiskal. Tambahan penerimaan ini yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi harga energi, seperti BBM dan listrik, sehingga level inflasi di tingkat konsumen relatif terjaga.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, memiliki posisi *behind-the-curve* dalam pemulihan pasca Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik juga ditopang oleh berbagai macam faktor, seperti faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri, performa ekspor yang sangat baik, dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat mendorong sisi konsumsi dan produksi dalam negeri dalam kondisi yang sangat baik. Mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi domestik yang sejauh ini masih menunjukkan sinyal positif dan inflasi yang masih relatif terkendali, Indonesia nampaknya menghadapi probabilitas yang sangat kecil untuk jatuh dalam ancaman stagflasi, setidaknya dalam jangka pendek.

Hal Yang Perlu Diwaspadai

Kedepannya, ada beberapa hal yang patut diwaspadai. Pertama, perlambatan aktivitas perekonomian global, termasuk partner dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok dan AS, memiliki potensi untuk menghambat nilai ekspor Indonesia. Adanya indikasi penurunan harga komoditas energi utama juga berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan nilai ekspor Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, apabila inflasi dalam negeri terus merangkak naik, kondisi ini akan menggerus daya beli masyarakat secara keseluruhan. Implikasinya adalah akan ada tekanan terhadap tingkat konsumsi dalam negeri. Dengan tren pengetatan kebijakan moneter global dan kemungkinan Bank Indonesia juga akan melakukan pengetatan moneter dalam waktu dekat mendorong adanya ancaman penurunan investasi. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya mandat pengembalian defisit di bawah 3% per tahun 2023, membuat adanya tekanan untuk pemerintah Indonesia melakukan penghematan belanja sehingga berpotensi belanja pemerintah akan mulai menurun di masa mendatang.

Memperhatikan kondisi tersebut, dapat diamati bahwa berbagai sumber pertumbuhan ekonomi, baik itu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor, memiliki potensi untuk mengalami penurunan dalam beberapa waktu mendatang. Apabila tidak tertangani dengan baik, Indonesia tentu akan dihadapkan dengan ancaman perlambatan ekonomi. Lebih jauh, inflasi pun belum terlihat telah mencapai titik puncaknya sejauh ini. Sehingga, walaupun saat ini Indonesia masih jauh dalam ancaman stagflasi, pemerintah perlu fokus untuk menjaga sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta pengendalian inflasi agar tidak melonjak terlalu tinggi. Apabila hal ini gagal dilakukan, tentu Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk jatuh dalam stagflasi di masa mendatang. Kondisi yang sejatinya sedang dihadapi banyak negara di berbagai belahan dunia saat ini. ■

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Teuku Riefky
Peneliti
LPEM FEB UI

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

GOLEKIN: KERUPUK KULIT MILENIAL

Sofia Chandra, Avrilia Angelie

"Nama brand ini (Golekin) diangkat dari unsur bahasa Jawa "golek" artinya temukan karena makanan kerupuk kulit bisa menjadi cemilan favorit yang mudah ditemukan orang-orang. Teman-teman yang menikmati Golekin bisa menemukan penghibur di sela-sela kesibukan mereka."

- Vendico Juan Charista, CEO Golekin

> *Yang penting satu sih, passion. Kalo gak passion, gak bakal suka. Buka usaha itu butuh waktu dan passion. Percayalah waktu lo (yang) bakal terkuras di bisnis itu gede banget. Jangan pernah mengutamakan keuntungan. Lo harus pinter (dengan cara) duitnya lo puterin supaya survive.*

Kerupuk kulit sapi tampaknya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kerupuk kulit sapi terkenal dengan rasanya yang gurih. Akan tetapi, bagaimana rasa kerupuk kulit sapi jika dipadukan dengan bumbu-bumbu perasa? Golekin hadir dengan membawa inovasi tersebut untuk dapat dinikmati masyarakat Indonesia di pasar *foods and beverages* ini.

Awal Mula

Vendico Juan, CEO Golekin, mengawali bisnisnya berdasarkan kegemarannya sendiri. "Gue kan hobinya suka makan kerupuk kulit, terus gue merasa kurang *nih* kalau (rasanya) cuma standar doang. Gue pengen inovasi (rasa), *kayak* bumbu balado, keju manis, *barbeque* contohnya," jelas Vendico. Kerupuk kulit sapi yang fungsional, dapat dimakan sebagai lauk pauk atau cemilan, menjadikan peluang usaha ini makin besar. Berangkat dari hal inilah, Golekin terbentuk pada bulan April 2020.

Vendico merintis Golekin bersama dengan dua orang temannya yang berperan sebagai CFO dan Marketing. Vendico juga meminta bantuan modal dari orang tuanya untuk melakukan riset dari produk-produk yang saat ini dijual Golekin. Riset yang dilakukan berfokus pada kualitas produk dibandingkan kuantitasnya, mulai dari cara pengolahan, rasa yang ditawarkan, hingga metode pengemasan yang akan digunakan. Semua proses pembuatan Golekin, mulai dari kulit sapi mentah, penggorengan, hingga pengemasan, dilakukan secara *homemade*.

Tidak butuh waktu lama, 9 bulan semenjak bisnis ini didirikan ternyata cukup untuk Golekin mencapai titik *break-even point*. Sekarang, Golekin lebih berfokus untuk menghasilkan profit dan memaksimalkan perputaran uang pada usahanya.

Branding Millenial Menjanjikan Keunggulan

Vendico menginginkan *branding* Golekin yang terkesan milenial. Golekin yang memiliki varian rasa berbeda disertai dengan saluran penjualan beragam menjadikan bisnisnya milenial, yaitu gebrakan inovasi dengan tidak hanya mengikuti standar yang ada dan pemanfaatan teknologi dalam proses pemasarannya.

Varian rasa yang ditawarkan cukup beragam dan menggugah selera, mulai dari balado daun jeruk, lada hitam, hingga keju manis. Golekin juga memiliki produk selain kerupuk kulit sapi, yakni makaroni kering, yang terdiri atas rasa balado daun jeruk dan pedas. Rasa-rasa tidak biasa untuk produk kerupuk kulit sapi atau makaroni kering inilah yang membedakan Golekin dari produk-produk biasa. Apalagi kerupuk kulit sapi dengan tambahan bumbu perasa makanan menjadi keunikan sendiri dari bisnis Golekin.

Bisnis yang dikelola oleh tiga orang remaja yang memiliki hobi dan kegemaran yang sama ini menjual produk-produknya melalui *offline* (secara langsung) maupun *online* (melalui *marketplace*). Bila dipesan secara langsung (di acara *offline* seperti bazaar), Golekin dijual dengan kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000. Harga di *marketplace* adalah Rp18.900, berbeda karena terkena tambahan biaya admin. Golekin juga aktif mengikuti program-program promosi *marketplace* untuk meningkatkan *awareness* masyarakat.

Lahir di Kala Pandemi Merebak

Dibangun di saat pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Golekin. Perlu strategi yang kuat dalam memperkenalkan nama Golekin yang belum terkenal di pangsa pasarnya. Golekin mengawali usahanya dengan sistem *pre-order* secara langsung (melalui WhatsApp, LINE, dan Instagram), kemudian beralih ke *marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Golekin adalah menemukan *marketplace* dan melakukan pemasaran yang tepat agar pembeli bisa melakukan pembelian ulang.

"Gue sebagai orang awam merasa (penasaran) gimana sih cara jual di Shopee dan Tokopedia. Bagi gue yang pemula, susah banget *nyari* marketnya. Apalagi, sudah terbiasa (mengadakan) *pre-order by* PC (*personal chat*) via WhatsApp, LINE, atau Instagram. Kalau kita (Golekin) pakai *marketplace*, tantangan tersendiri adalah gimana cara cari *market* yang pas dan mereka (pembeli) tidak hanya penasaran soal Golekin doang, tetapi juga membeli berulang kali."

Tantangan lain bagi Golekin adalah bagaimana cara untuk bisa bertahan di bidang *foods and beverages*. "Dalam arti se-*enggak*-nya Golekin ini ada yang beli, *gak* mati. Jadi harus pinter-pinter *marketing*, *kayak* gimana, *branding* gimana, *sales* gimana," ujar Vendico.

Di tengah persaingan pasar yang sangat ketat, Vendico menegaskan bahwa *foods and beverages* adalah bisnis musiman yang mempunyai potensi besar apabila dikelola dengan benar. Vendico juga mengakui bahwa kompetitor di bisnis ini sangatlah banyak, tetapi dalam bidang kerupuk kulit sapi, Golekin hanya memiliki satu kompetitor. Golekin memiliki peluang besar untuk bisa menguasai pangsa pasarnya.

Passion adalah Kunci

Dengan *passion* yang kuat dalam bidang ini, Vendico berharap bahwa usaha Golekin ini bisa berkembang. Bukan hanya menjual kerupuk kulit sapi, tetapi juga bisa menjadi agen yang menjual cemilan-cemilan lain, seperti keripik kaca contohnya. Selain itu, ia juga memiliki impian agar ke depannya Golekin dapat merambat ke pasar internasional melalui ekspor.

"(Hal) yang penting satu *sih*, *passion*. *Kalo gak passion*, *gak* bakal suka. Buka usaha itu butuh waktu dan *passion*. Percayalah waktu *lo* (yang) bakal terkuras di bisnis itu *gede* banget. Jangan pernah mengutamakan keuntungan. Kalau mengutamakan keuntungan, *lo* pasti bakalan cepet bangkrut. *Lo* harus pinter (dengan cara) duitnya *lo* puterin supaya *survive*." ■

FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI

Vendico Juan Charista
Chief Executive Officer
Golekin

PERGI

Jeni Rima

FOTO: EYUP BELLEN | PEXELS.COM

Sejak matahari bergerak naik pun kembali turun, kulihat dari balik jendela kamarku berbagai komponen langit setiap harinya mengalami pergerakan. Setidaknya awan-awan di langit yang terlihat monoton pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan bergerak mengikuti arah angin ataupun berubah warna menggelap setiap kali air meluncur bebas ke bumi. Menyenangkan ya merasakan kehidupan yang sesungguhnya? Kehidupan yang menyenangkan katanya… tahu apa aku soal kehidupan. Terlebih kebahagiaan yang tidak jelas definisinya. Buku-buku yang kubaca bahkan tak pernah memenuhi definisi kebahagiaan yang aku butuhkan untuk menjawab pertanyaan yang kerap ditanyakan oleh ibuku.

Setiap saat ibu menanyakan hal yang sama, tentang kebahagiaan-kebahagiaan yang sepertinya ingin ia wujudkan untukku. Tetapi maaf ibu, bila perasaan yang terdengar indah itu tak pernah sekalipun mengetuk relungku. Kemarin ayah dan ibu baru saja pulang dari tempat antah berantah yang sepertinya tak akan mereka izinkan aku untuk jejaki. Tangan Ibu penuh dengan tumpukkan buku beragam warna yang selama ini menjadi tempatku untuk mengadu akan banyaknya hal yang ingin kutemui di dunia ini. "Naya, Ibu bawakan kamu banyak buku-buku menarik. Kamu senang, kan?"

"Ya, Ibu. Terima kasih. Aku senang," jawabku membual. Aku berbicara seolah-olah pernah merasa hidup senang dari bilik berukuran 4x6 meter ini dengan udara terbatas yang hanya mampir masuk apabila jendela kamar dibuka seperempat sisi. Tidak, Ibu. Di sini sesak.

Ayah tersenyum berseri-seri seperti memperoleh harta karun, seindah itukah dunia luar? Aku makin penasaran dan mempersilahkan ayah bercerita bahwa ia dan ibu menyusuri jalan sejak pagi buta.

Mereka pergi ke toko roti langganan ibu di sudut kota yang pagi-pagi saja aroma rotinya sudah membuat pengendara di sekelilingnya tersihir untuk memarkirkan kendaraannya di depan toko. Sama halnya seperti kedua orang tuaku yang menceritakannya demikian. Lalu, ayah bercerita tentang kasir toko roti yang menanyai kabarku begitu mereka masuk ke toko. Padahal, mengetahui wajah sang kasir saja tidak, tetapi aku tetap mendengarkan cerita ayah dengan raut wajah dibuat setertarik mungkin dan dengan respon sekecil apapun supaya ayah terlihat lega menceritakannya dan supaya ayah puas akan responku.

"Ceritakan semuanya Ayah, aku ingin tahu lebih banyak." Begitu kataku yang sepertinya membuat suasana kamarku lebih hangat dari sebelumnya. Mungkin juga karena tangan ibu menggenggam jari-jemariku lebih erat dari biasanya. Sesekali kubalas genggaman ibu untuk menenangkannya. Seakan baru menyaksikan hal yang tidak diinginkannya, ibu selalu bersikap seperti tidak ingin kehilanganku. Tentu saja, setiap ibu di dunia ini memperlakukan anaknya begini, kan. Padahal aku selalu berada di sini, di kamar yang ia susun, di tempat yang ia bilang tak boleh kutinggalkan, dan di tempat yang ibu rasa paling aman bagiku. Lantas, apa lagi yang ibu takuti? Ibu, aku selalu di sini bersamamu dan menuruti keinginanmu. Kali ini aku juga punya keinginan yang ingin kusampaikan setelah ayah selesai menceritakan betapa cantiknya pusat perbelanjaan yang keduanya datangi. Menarik sekali, aku juga ingin memutari kota dan menghirup udara luar. Meskipun ayah selalu bilang udara kota kotor dan tidak baik untuk saluran pernapasanku. "Indah ya Ayah, apa aku boleh ikut?" Tanyaku dengan senyum tulus yang sungguh rapuh.

Mendengar responku, ayah tersenyum getir. Sepertinya begitu berat baginya untuk mengiyakan permintaanku yang satu itu. "Nanti ya sayang. Segera. Setelah semuanya sudah baik-baik saja." Hatiku kembali mencelis. Segera yang selalu dijadikan jaminan atas permintaanku itu rasanya semakin hampa. Tak ada artinya karena tak kunjung terwujud. "Apa boleh aku keluar sebentar saja, Yah?" Tanyaku keras kepala. ibu memasang wajah kecewa atas permintaanku yang semakin memojokkan mereka. Maaf ibu, aku sudah tidak tahan hanya bergelung dalam selimut, berjalan di sekitar kasur, membolak-balik lembaran buku yang lama-kelamaan membosankan, dan sesekali memandangi jendela dibalik hiruk pikuk jalan raya. Semuanya punya kehidupan sedangkan kehidupanku dibatasi kamar ini.

"Sayang, cepat pulih ya supaya keinginanmu segera tercapai. Ayah dan Ibu juga ingin mengajakmu pergi." Bohong. Ayah dan ibu tak akan pernah mengizinkanku pergi. Aku menarik selimutku, menyembunyikan kekecewaan yang mungkin sudah tergambarkan dari sikapku, dan tak menanggapinya lagi. Ibu terlihat masih ingin melihat wajahku tapi aku menutupinya dengan selimut, ayah terlihat masih ingin berbincang tetapi ceritanya tak lagi kuberikan tanggapan. Hingga hari ini, ayah dan ibu mampir ke kamarku dan aku hanya melirik mereka sekilas sebelum kembali memandangi langit yang terlihat lebih mampu mencontohkan kehidupan yang ideal dibandingkan kedua orang tuaku sendiri.

Aku sayang kedua orang tuaku. Ingin terus berada di sisi mereka, tetapi cara mereka menyayangiku tampaknya tidak tepat bagi kehidupanku. Apakah karena akulah satu-satunya yang mereka miliki? Teman-teman yang seringkali mengunjungiku, mereka menceritakan kakak atau adiknya yang berulah dan membuat kedua orang tuanya bersungut-sungut. Meski begitu, kedua orang tuanya tak pernah melarang

mereka untuk pergi ke luar dan mencoba berbagai hal. Kebebasan yang terdengar menggiurkan bagiku. Lantas kusampaikan pada ibu terkait keinginanku untuk memiliki seorang adik. Kuharap cara kali ini dapat membuka jalanku untuk diizinkan pergi dari kamarku ini.

"Ibu," panggilku membuat senyum ibu kembali merekah. Setelah tiga hari aku diam saja ketika diajak bicara, tentu kali ini ibu merasa bahwa aku tak lagi merajuk padanya.

"Ya, Naya sayang.. Ibu di sini." Suara Ibu terdengar lesu walau dengan senyum lebar menanggapiku.

"Nay pikir, Nay membutuhkan adik." Aku menahan suaraku sesaat. Rasanya kalimat ini kurang tepat. "Maksud Nay, apakah Ibu tidak kesepian bila hanya bersama Nay setiap saat?"

Ibu terlihat berpikir atas pertanyaanku yang tiba-tiba. Selama tiga belas tahun aku hidup, baru kali ini aku membahas tentang saudara kandung yang tak pernah terpikirkan olehku sebelumnya. Mungkin awalnya aku tak pernah mempermasalahkan kebebasan dan keistimewaan yang diperoleh sebagai anak tunggal.

Ibu hanya menatap mataku dengan sendu. Tatapan yang tajam itu seperti ditujukan untuk membaca tujuan awalku menyinggung hal ini. Kepanikan pun muncul setelah aku membalas tatapan tidak mengenakkan yang ibu berikan. "Aku hanya ingin Ayah dan Ibu tidak kesepian bila hanya bersamaku. Dengan begitu, Ibu dan Ayah juga tidak perlu terlalu fokus hanya kepada diriku," tambahku yang sepertinya tak memberikan hasil yang baik. Tatapan ibu malah semakin sendu, semakin kecewa atas apa yang kulontarkan.

"Ibu tidak memerlukan yang lainnya, Ibu hanya perlu kamu tetap berada di samping Ibu." Jawaban itu telak, tak bisa diganggu gugat. Ibu tak membiarkanku kembali membahas perihal adik. "Tidak akan ada yang mengalihkan fokus Ibu dari kamu, Kanaya. Kamu juga tidak perlu memikirkan hal lain, kamu hanya perlu fokus pada dirimu. Tidak pada perasaan Ayah ataupun Ibu."

Rasanya kekesalanku jadi memuncak akan ucapan ibu yang terdengar begitu meyakiniku bahwa ini semua untuk diriku sendiri walau pada dasarnya yang kurasakan tak pernah demikian. Justru kalian hanya fokus pada perasaan kalian dan tak pernah membiarkanku memilih yang seharusnya bagiku. Ibu dan ayah tidak akan pernah merasakan kesepian dan ketakutan yang kualami saat ini. Mataku memerah, rasanya air mata menggenang di sana dan aku tak membiarkan hal itu dilihat ibu. Setidaknya biarkan ibu berpikir bahwa keputusannya telah bijak. Biarkan ibu berpikir demikian.

Aku memilih tak menjawab. Berbalik memunggungi ibu dan menarik selimut hingga ke leher. Kurasakan tangan ibu membelai rambut pendekku yang kusut. Air mata yang menggenang di mataku pun merembes hingga ke selimut. Aku mendengar suara tangis ibu yang tertatih-tatih. Ibu kesusahan karena aku dan aku di sini masih berpikir untuk pergi mencari kebebasan dan kebahagiaan tanpa arti yang jelas. Anak macam apa aku ini. Seharusnya sejak awal aku tak usah berpikir untuk pergi. Rasa bersalah mulai menggerogoti dadaku. Mataku yang terus bekerja menghasilkan tetesan bening pun mulai lelah. Tak dapat kudengar lagi suara sesak Ibu. Mungkin sebaiknya aku memejamkan mata sejenak agar tak perlu memikirkan rencana-rencana tak berguna yang justru menyesakkan orang tuaku. Lantas pikiran pergi itu menghilang bersamaan dengan mataku yang tertutup perlahan-lahan.

Gemerincing bel yang berbunyi tatkala pintu toko roti terbuka sudah bekerja di pagi hari. Sang kasir baru saja memasang apronnya kembali setelah membantu bagian dapur. Gadis muda tersebut langsung tersenyum siaga dan bersiap memberikan sapaan pada pembeli pertamanya. "Selamat pagi. Selamat datang di Binar Bakery." Mata sang kasir melebar antusias begitu melihat sepasang suami istri yang telah menjadi pembeli tetap toko roti yang letaknya di sudut kota ini. Tempat yang kedengarannya kurang strategis meski nyatanya pelanggan toko ini sama banyaknya dengan toko roti di tengah pasar sekalipun. "Ooh, Ibu Nia dan Bapak Sur. Sudah sekitar satu bulan sejak Bapak dan Ibu mengunjungi toko kami. Bagaimana kabarnya Pak, Bu?"

Wanita paruh baya yang disapa oleh kasir toko roti langganannya lantas tersenyum. Senyum yang lembut, bukan senyum yang getir ataupun senyum basa-basi. Sang kasir yang hampir setiap pagi, selama dua tahun, selalu melihat senyum wanita ini pun terkejut dengan perubahan yang dapat dirasakan olehnya. Bapak yang biasanya mendampingi Ibu dengan wajah kurang tidur dan kadang kala kehilangan fokus, kini terlihat berada pada performa terbaiknya meski kerutan bertambah di sekitar matanya.

"Kami baik-baik saja, mbak. Terima kasih sudah bertanya," ucap sang wanita. Tatapan sang kasir saja sudah cukup membuatnya sadar bahwa ia perlu menambahkan jawaban lain. "Anak saya, Naya, juga sekarang kondisinya sudah baik-baik saja."

Gadis kasir tersenyum dan melongok ke sisi kanan dan kiri seperti mencari keberadaan seseorang. "Apakah Kanaya ikut ke sini? Saya mau menyapa gadis hebat dan kuat itu."

Bapak menggeleng. "Kanaya gak ikut, mbak. Sudah pergi ke tempat yang diinginkannya." Suara Bapak terdengar yakin. Gadis kasir itu terkejut dan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Ternyata apa yang ia pikirkan salah. Gadis muda malang yang sejak usia tiga belas tahun telah mengalami cedera berat di kepalanya akibat suatu kecelakaan. Kini perjuangan dua tahunnya berakhir dengan kepergiannya.

"Anak saya memang hebat ya, mbak. Bertahan dua tahun untuk menemani kami bercerita dan memenuhi keinginan kami yang tidak sanggup atas kepergiannya. Saya terkejut bahwa ia bisa bertahan dua tahun meski selama ini dokter selalu bilang waktu anak saya sudah tidak lama lagi." Wanita paruh baya ini mengingat-ingat respon kecil anaknya atas cerita-cerita yang ia bacakan dari buku-buku yang selalu dibawanya ke rumah sakit. Kadang satu atau dua jari gadis itu bergerak kecil memberikan tanda bahwa ia ikut mendengarkan ibunya membaca.

"Naya juga selalu mendengarkan saya bercerita walaupun cerita saya membosankan, jarinya bergerak seperti memberi tanda bagi saya untuk melanjutkan cerita. Mungkin itu yang memupuk harapan kami untuk tidak melepaskannya walau sebenarnya yang ia inginkan hanya menemani kami sementara… Tetapi kami terlalu egois dengan menahannya terlalu lama." Bapak merangkul ibu di sampingnya untuk menguatkan ibu yang sepertinya akan kembali mengingat-ingat kenangan terakhir dan pahit bersama anak semata wayangnya.

Ibu menggeleng. "Kami tidak bersedih lagi, kok. Iya kan, Pak? Demi kebahagiaan dan kebebasan Naya di atas sana." Ibu melirik Bapak di samping kirinya lalu kembali memandang gadis kasir dengan senyum ikhlasnya.

Ikhlas terdengar sederhana. Namun bila telah dihadapkan dengan situasi harus mengikhlaskan, manusia cenderung berkelit dengan berbagai dalih bahwa segalanya masih bisa diusahakan. Baginya, makna diusahakan tak lagi berbeda dengan dipaksakan. Lupa bahwa ikhlas itu perlu dipelajari seumur hidup, selagi masih memiliki hal terkasih yang dapat pergi kapan saja. Tak ada satupun manusia di dunia ini mampu melepas yang terkasihnya dengan mudah. Akan tetapi, keberhasilan atas kesedihan dalam melepas sesuatu dengan ikhlas akan memberikan kelegaan yang seutuhnya sekalipun bagi kepergian yang terlampau menyakitkan. ■

Jeni Rima
Staff Divisi Peneribitan
Badan Otonom Economica

FOTO: ASPRILLA DWI ADHA | ANTARAFOTO.COM

BPJS KETENAGAKERJAAN: PILAR PROTEKSI GIG WORKERS INDONESIA

Gabriel Fiorentino Setiadin

Gig workers adalah konsep jenis pekerjaan yang cukup menarik bagi kalangan muda saat ini. Namun, proteksi tentunya menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan karier. Lantas, bagaimanakah peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan proteksi tersebut?

Semakin berkembangnya tren *gig economy* di Indonesia meningkatkan urgensi adanya proteksi bagi para *gig workers*. BPJS ketenagakerjaan sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja di Indonesia berperan penting dalam menjamin para *gig workers* memiliki proteksi yang layak. Secara umum, BPJS ketenagakerjaan menyediakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan membedakan segmentasi pesertanya menjadi dua segmen, yaitu Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU). Program yang ditawarkan kepada BPU berupa JKK dan JKM. Selain itu, beberapa peserta BPU sebenarnya juga ditawarkan program JHT. Namun, untuk saat ini memang belum ada segmentasi khusus *gig workers*.

Tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan

"Kita harus lebih men-*differentiate* kategorinya. Karena memang istilah *gig workers* itu baru ramai beberapa tahun terakhir. Kalau BPU sendiri, posisi sekarang itu peserta aktif kita di angka 4,9 juta dan kategorinya memang berdasarkan sektor-sektor tertentu menurut aturan yang sekarang. Apakah di dalamnya ada *gig workers*? Pasti ada, tapi berapa bagiannya dari 4,9 juta itu perlu (ditelusuri) lebih dalam. Sampai saat ini belum ada pembagian segmentasi khusus untuk *gig workers* dan ini menjadi tantangan karena memang arah ke depan nampaknya yang muda-muda *nih* lebih cenderung ke *gig workers instead of* pekerja formal," jelas Roswita Nilakurnia selaku Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain pengaturan lebih spesifik mengenai segmentasi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terdapat tantangan lian yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan proteksi yang layan bagi para *gig workers*. "Tantangannya ini adalah pemahaman dari para pekerja itu sendiri, pengetahuan dari para pekerja itu sendiri, dan bagi kami PR-nya adalah sosialisasi, yaitu seberapa informasi tersebut dapat tersebar dan dipahami," terang Roswita.

Roswita juga menambahkan bahwa tantangan lain yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah memastikan pesertanya memiliki kemudahan akses dalam mendapatkan klaim. Roswita menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus dapat memastikan pekerja Indonesia yang bekerja di dalam maupun di luar negeri dapat dengan mudah melakukan klaim atas hak mereka sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan.

Evaluasi, Instruksi, dan Kolaborasi

Roswita memaparkan evaluasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan rencana perbaikan yang sudah mulai dijalankan. Dari sisi kepesertaan, secara target memang hampir semua pekerja formal sudah terjangkau, sehingga konsentrasi BPJS Ketenagakerjaan ke depannya adalah kepada pekerja informal atau pekerja mandiri, salah satunya adalah *gig workers*. "(Hal ini) berarti kampanye informasi mengenai program ini harus bisa masif dan tersampaikan melalui media yang sesuai," tutur Roswita.

Dari segi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan kalau peserta dapat dengan mudah melakukan klaim, sehingga prosedur klaim perlu disimplifikasi. Hal ini sudah mulai dilakukan dan membuahkan hasil peningkatan kesuksesan klaim yang nyata. *Success rate* pengambilan klaim naik dari saat awal direksi diangkat yang hanya 55% menjadi 85% saat ini. Terkait bentuk pelayanan yang diberikan, Roswita menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah belajar dari masa pandemi. Awalnya pelayanan terkonsentrasi pada pelayanan fisik, tetapi setelah pandemi kanalnya ada yang fisik dan hybrid, serta sudah diotomatisasi melalui Jamsostek Mobile. Kanal-kanal tersebut yang akan menjadi sarana komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta. "*Customer journey*-nya juga harus *smooth*," tegas Roswita. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hal, seperti sistem teknologi informasi, harus ditingkatkan. Selain itu, Roswita juga menambahkan pentingnya budaya yang lebih *costumer centric*.

Dalam meningkatkan proteksi jaminan sosial kepada pekerja Indonesia, seperti *gig workers*, BPJS Ketenagakerjaan juga berkolaborasi dengan beberapa pihak. Pada tahun 2021, terdapat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang menginstruksikan beberapa lembaga pemerintahan untuk memperbesar cakupan perlindungan jaminan sosial ke seluruh rakyat Indonesia. Roswita berkata bahwa Instruksi Presiden ini membuat pemerintah daerah semakin terdorong untuk menyediakan anggaran untuk melindungi pekerja rentan. Tidak hanya bantuan dari sesama lembaga pemerintah, beberapa pihak swasta juga membantu proteksi pekerja Indonesia dengan melakukan perlindungan kepada pekerja-pekerjanya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan lembaga riset independen dalam melakukan kajian untuk meningkatkan fleksibilitas iuran produknya, seperti opsi *top-up* iuran untuk mendapatkan manfaat JHT.

Dari BPJS Ketenagakerjaan Untuk *Gig Workers* Indonesia

"Pekerja Indonesia, baik formal atau informal, merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Artinya kesadaran untuk mem-*protect* diri sendiri itu penting karena memang harus ada kesadaran dan pemahaman tentang manfaat program," seru Roswita. Ia menambahkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan sifatnya memang baru akan dirasakan saat suatu risiko sudah terjadi atau dalam jangka panjang, tetapi akan lebih baik jika proteksi tersebut dipersiapkan dari sekarang. Hal ini karena program BPJS Ketenagakerjaan bersifat *controllable, highly regulated*, dan *given* dalam undang-undang. "Ke depan, karena fenomena *gig workers* semakin tinggi, jadi (*gig workers*) harus mulai *aware* terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sedari dini, (dan) harus mulai mendaftarkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan," pesan Roswita. ■

Roswita Nilakurnia
Direktur Pelayanan
BPJS Ketenagakerjaan

FOTO: BPJSKETENAGAKERJAAN.GO.ID

BPJS Ketenagakerjaan
panggil kami bpjamsostek
AYO SEJAHTERAKAN PEKERJA SEKITAR ANDA
Daftarkan suami/istri yang bekerja, PRT, sopir pribadi, tukang kebun, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lainnya menjadi peserta BPJAMSOSTEK
Mulai dari
Rp 36.800,- /Bulan
(Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua)
Melalui Aplikasi
JMO
JAMSOSTEK MOBILE
175
TanyaBPJAMSOSTEK
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
BPJS Ketenagakerjaan
Bpjs.Ketenagakerjaan
JMO
BPJS Ketenagakerjaan
@BPJSTKinfo
#SERTAKAN

JUTAAN PEKERJA SUDAH DOWNLOAD JMO KALAU KAMU?

JMO
JAMSOSTEK MOBILE

LEBIH CEPAT
LEBIH MUDAH
LEBIH LENGKAP

DOWNLOAD UNTUK DAPATKAN KEMUDAHANNYA!

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Informasi lebih lanjut dapat akses melalui link: **http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/**

BUMN UNTUK INDONESIA
PANN Maritime Finance
PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
Perusahaan pembiayaan pilihan utama khususnya di bidang maritim dan industri penunjang maritim.
The first choice financing company, especially in the maritime and maritime supporting industries.
Pilihan Utama Industri Maritim
PANN Maritime
021-31922003
www.pannmaritim.com
corporate@pannmaritim.co.id
PT PANN Pembiayaan Maritim terdaftar dan diawasi oleh OJK
AKHLAK

provisio
consulting

We are Indonesian tax practitioners with a worldwide perspective partnering with business leaders to address their most pressing challenges and seize their most promising possibilities in a thorough understanding of domestic and international tax world.

www.provisio-id.com

provisioconsulting

provisioconsulting

BUMN UNTUK INDONESIA

PERTAMINA

HADIRKAN ENERGI UNTUK KEBAIKAN NEGERI

GREEN ENERGY STATION

Pertamina menghadirkan, Green Energy Station (GES). Inovasi SPBU bertenaga surya yang efisien serta ramah lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik.

- Panel surya sebagai sumber energi SPBU.
- Mobile booking EV charging, cashless payment & loyalty reward dari Aplikasi MyPertamina.
- Pilihan produk lebih ramah lingkungan, Pertamax Series, Dex Series & layanan SPKLU (Charging Station)
- Battery Swapping Station untuk EV roda 2 yang menawarkan kemudahan "swap & go"

Mari sambut energi bersih untuk Indonesia lebih baik.
Energizing Sustainable Future, Energizing You

www.pertamina.com

PERTAMAX TURBO · PERTAMAX · PERTAMINA DEX · DEXLITE · MyPERTAMINA · PERTAMINA CALL CENTER 135